



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Magelang

TAHUN ANGGARAN 2024

 <https://bpbdmagelangkota.go.id>

 bpbdkotamagelang@gmail.com

 (0293) 319 3701

Jl. Lamtoro No.71, Tidar Baru, Kota Magelang

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat dilihat dari capaian kinerja serta memberikan gambaran dan memberikan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk tahun – tahun kedepan. Penyusunan LKjIP tahun 2024 merupakan dokumen LKjIP yang tahun ke tiga disusun sehingga dalam penyelenggaraan penanggulangan penanggulangan bencana masih banyak kekurangan, kelemahan baik dari sisi perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan tugas kebencanaan.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak atas tersusunnya dokumen ini, semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini bisa memberikan manfaat , khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang untuk menentukan rencana aksi yang lebih terarah dan lebih baik.

Magelang, 28 Februari 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Magelang



Machbub Yani Arfian, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dan sasaran strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung misi ke 5 atas RPJMD Kota Magelang tahun 2021 – 2026 merupakan tahun ke tiga dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja sasaran yang telah dicapai pada tahun 2024 merupakan capaian yang cukup baik dan meningkat dimana sasaran tersebut didukung langsung oleh satu-satunya program yang ada pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan satu program pendukung yang terdiri 9 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 4.592.438.879,- terserap Rp. 4.422.939.211,- atau sebesar 96.31% .dengan satu sasaran yang termuat di dalam Rencana Strategis Badan Pananggulangan Bencana Daerah “ Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana” . dengan target menurut target RPJMD taun 2024 sebesar 47.40 tercapai 48 atau sebesar 101.27% sedangkan target yang ditetapkan perangkat daerah sebesar 41 tercapai 48 atau sebesar 117.07% yang terdiri dari tujuh prioritas dengan variable penilaian Indeks Ketahanan daerah :

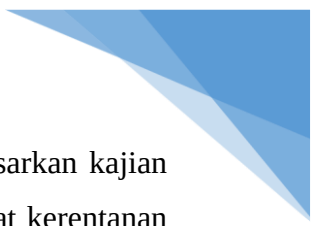
1. Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan tercapai : 0.79
2. Indeks Risiko dan Perencanaan Terpadu tercapai : 0.70
3. Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik tercapai : 0.63
4. Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bnecana tercapai : 0.75
5. Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana tercapai : 0.44
6. Indeks Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana tercapai : 0.34
7. Indeks Sistem Pemulihan Bencana tercapai : 0.36

Sehingga dari hasil perhitungan ketujuh parameter tersebut menjadi hasil akhir 0.48

Jika dibandingkan dengan sasaran tahun sebelumnya , tahun 2023, target sasaran sebesar 33.20 dan tercapai 39, dengan demikian capaian ini telah melampaui target dengan prosentase sebesar 117.47% dengan peningkatan berdasarkan tahun lalu sebesar 144.58%

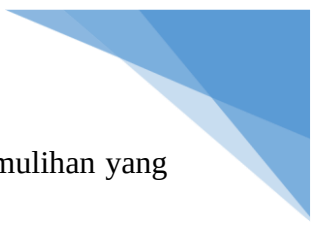
Meskipun target indikator dan sasaran dapat tercapai bahkan melampaui target, namun masih terdapat permasalahan sehingga sasaran tersebut capainnya dapat lebih tinggi, diantaranya :

1. Belum tersedianya mekanisme, sistem informasi pendataan dan pengambilan kebijakan terkait mitigasi bencana baik parsial maupun kawasan dalam rangka pengurangan resiko bencana bagi masyarakat maupun instansi

- 
2. Belum tersedianya dokumen rencana aksi penanggulangan bencana berdasarkan kajian resiko bencana Kota Magelang baik terhadap tingkat potensi bahaya, tingkat kerentanan maupun pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Magelang
 3. Belum memiliki kajian kebutuhan Logistik dan Peralatan penanggulangan bencana per jenis potensi bahaya sesuai standart
 4. Belum memiliki Standart Operasional Prosedur dalam rangka Penanggulangan Bencana yang memadai dan diatur dalam peraturan walikota guna mengikat kesiapan instansi terkait sesuai tugas pokok dan kewenangannya
 5. Belum tersedianya mekanisme pemberian bantuan kepada korban dampak bencana baik saat darurat bencana maupun pasca bencanayang bersumber dari dana APBD sebagaimana diamanatkan dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam rangka penanggulangan bencana
 6. Belum tersedianya database masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah rawan
 7. Belum adanya legalisasi atas dokumen Pengurangan Risiko Bencana yang sudah disusun.
 8. Belum adanya Early Warning System (EWS)

Untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut rencana yang akan dilaksanakan :

1. Pembentukan forum resiko bencana tingkat Kota Magelang sebagai forum terbuka dalam menyampaikan permasalahan kerentanan terhadap resiko bencana dan rencana solusi penanggulangannya. pada tahun 2025
2. Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Magelang yang berisi rencana aksi penanggulangan bencana baik fase prabencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana pada tahun 2025
3. Penyusunan kajian Logistik dan Peralatan Penanggulangan bencana pada tahun 2025
4. Penyusunan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Tahun 2025
5. Penyusunan Peraturan Wali Kota pemberian bantuan darurat bencana tahun 2025
6. Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Magelang serta Pendataan mandiri.
7. Usulan Surat Keputusan Wali Kota Magelang tahun 2025 terkait Dokumen Pengurangan Risiko Bencana Tahun yang telah disusun.
8. Diusulkan pada Perubahan Rencana Kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.
9. Peningkatan koordinasi lintas sektor, agar penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana memastikan respon cepat, terkoordinasi dan efektif yang secara keseluruhan memberikan dasar yang kuat untuk



merespon dengan cepat, mengurangi dampak bencana serta memastikan pemulihan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi yang termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sangat bermanfaat guna menentukan strategi dan kebijakan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang dalam perbaikan mencapai kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

PENGANTAR..... ii

Ikhtisar Eksekutif..... iii

DAFTAR ISIvi

DAFTAR TABELvii

DAFTAR GAMBARviii

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 2

1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 4

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan..... 9

1.4 Isu – Isu Strategis 12

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran..... 13

Sumber Daya Manusia 13

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023..... 22

BAB II 24

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 24

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 24

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 25

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024..... 26

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 30

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja..... 31

BAB III 37

AKUNTABILITAS KINERJA 37

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024..... 37

3.2 Capaian Kinerja Lainnya 51

3.3 Realisasi Anggaran 58

3.4 Inovasi..... 59

3.4 Lintas Sektoral 62

BAB IV 66

PENUTUP 66

4.1 Kesimpulan..... 66

4.2 Langkah-langkah Perbaikan Kinerja..... 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi..... 14

Tabel 1. 2 Sarana Prasarana..... 16

Tabel 1. 3 Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024 21

Tabel 1. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 23

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA)..... 25

Tabel 2. 2 Strategi dan Arah Kebijakan 26

Tabel 2. 3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024..... 27

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang Tahun 2024 30

Tabel 2. 5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 31

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Daerah 39

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024 40

Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan 41

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran 42

Tabel 3. 5 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 44

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja SPM Sub – Urusan Bencana..... 52

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)..... 53

Tabel 3. 8 Kontribusi Sasaran Perangkat Daerah terhadap Capaian sasaran Pemerintah Kota Magelang 54

Tabel 3. 9 Kontribusi Program Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah 56

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran..... 59

Tabel 3. 11 Inventarisasi Lintas Sektor Perangkat Daerah 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 CASCADING 3

Gambar 1. 2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis BPBD Kota Magelang..... 4

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi BPBD Kota Magelang 9

Gambar 2. 1 SMART MAGELANG 32

Gambar 2. 2 Website BPBD..... 33

Gambar 2. 3 Instagram BPBD 34

Gambar 2. 4 Twitter/X BPBD..... 35

Gambar 3. 1 Aplikasi Kentongan 60

Gambar 3. 2 Aplikasi Berbasis Web SIHAB 61

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I berisi :

1. *Cascading*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur organisasi*
3. *Tugas, fungsi dan jabatan*
4. *Isu-isu strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 20 2024*

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan elaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kota Magelang di susun berdasarkan atas capaian perencanaan tahunan yang telah disusun BPBD yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 maupun perubahannya. Dasar hukum penyusunannya meliputi :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban hasil kerja dan kinerja pemerintah kepada pemangku kepentingan
2. Memberikan gambaran untuk melakukan evaluasi atas perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan
3. Untuk mengambil kebijakan dan upaya perbaikan yang berkelanjutan serta merumuskan strategi kedepan



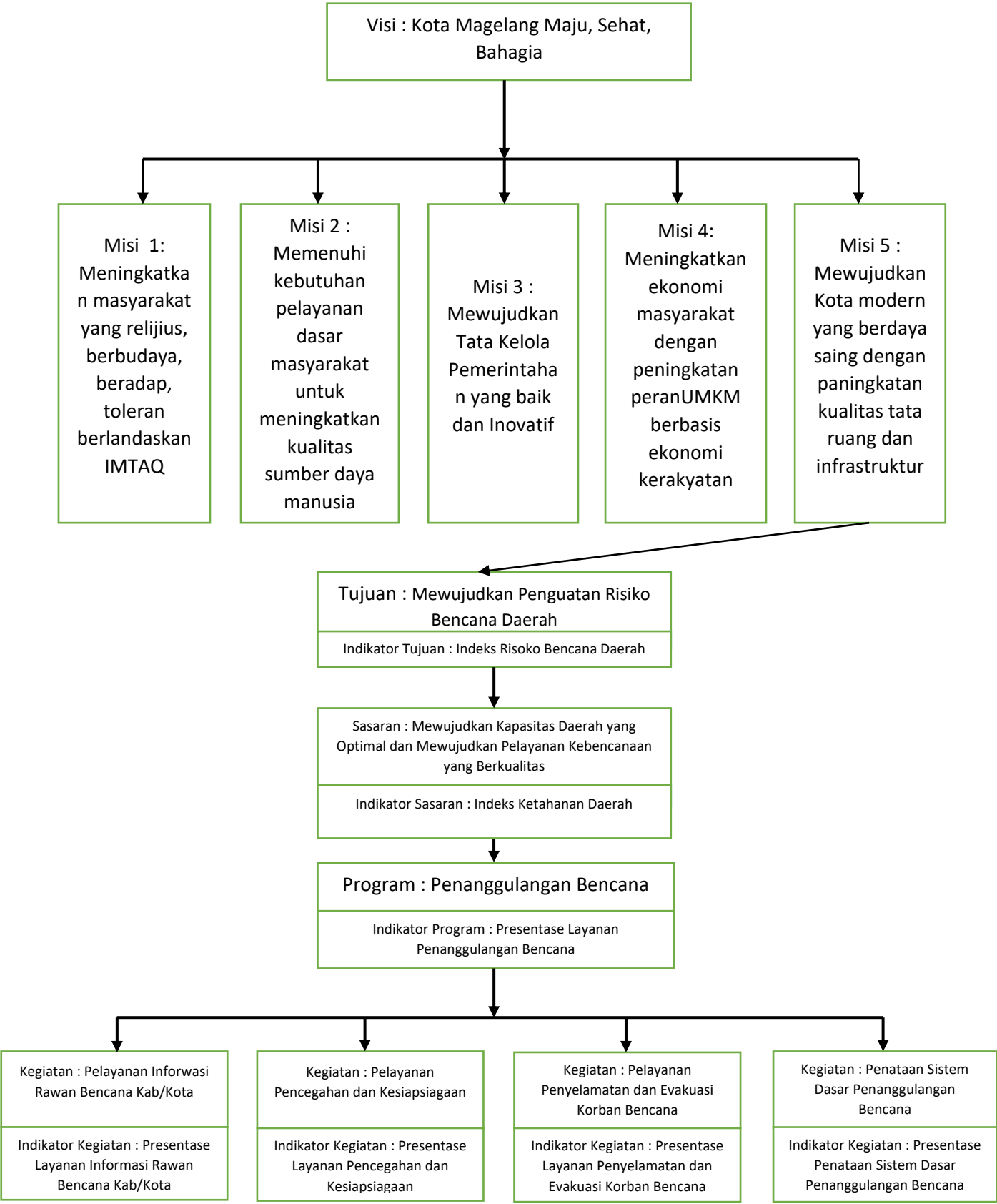
Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu OPD yang berkontribusi mendukung pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran yang teridentifikasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 sesuai dengan Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 meskipun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang baru berdiri berdiri pada tahun 2022 namun secara jelas sasaran yang terdapat dalam dokumen RPJMD tersebut selaras dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Magelang .

Adapaun cascading Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang sebagai berikut :

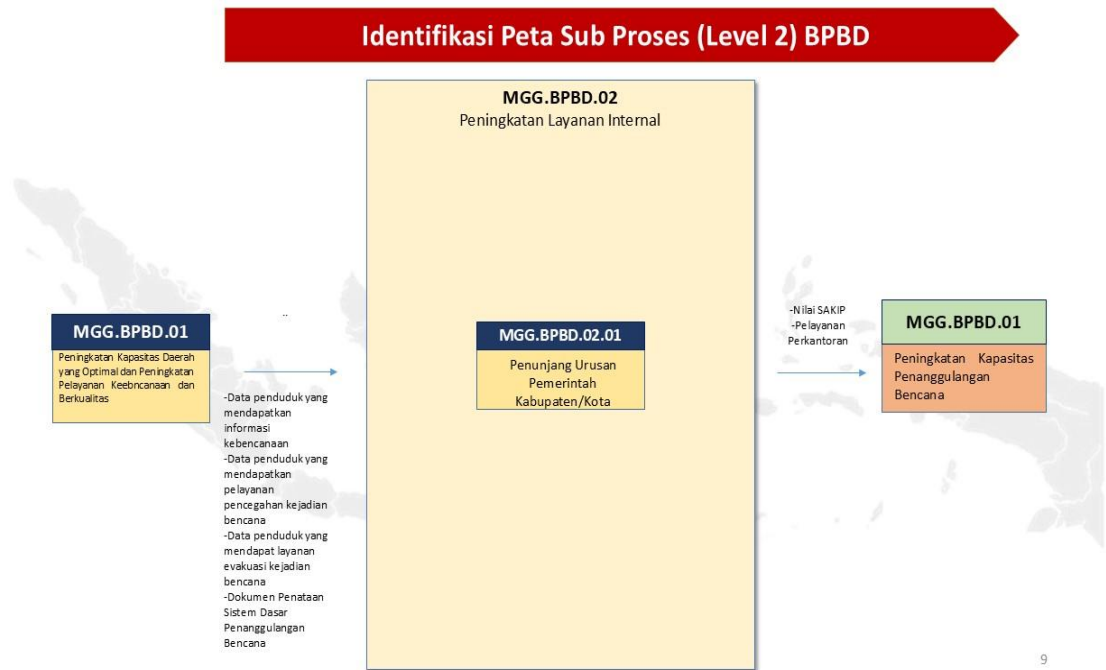
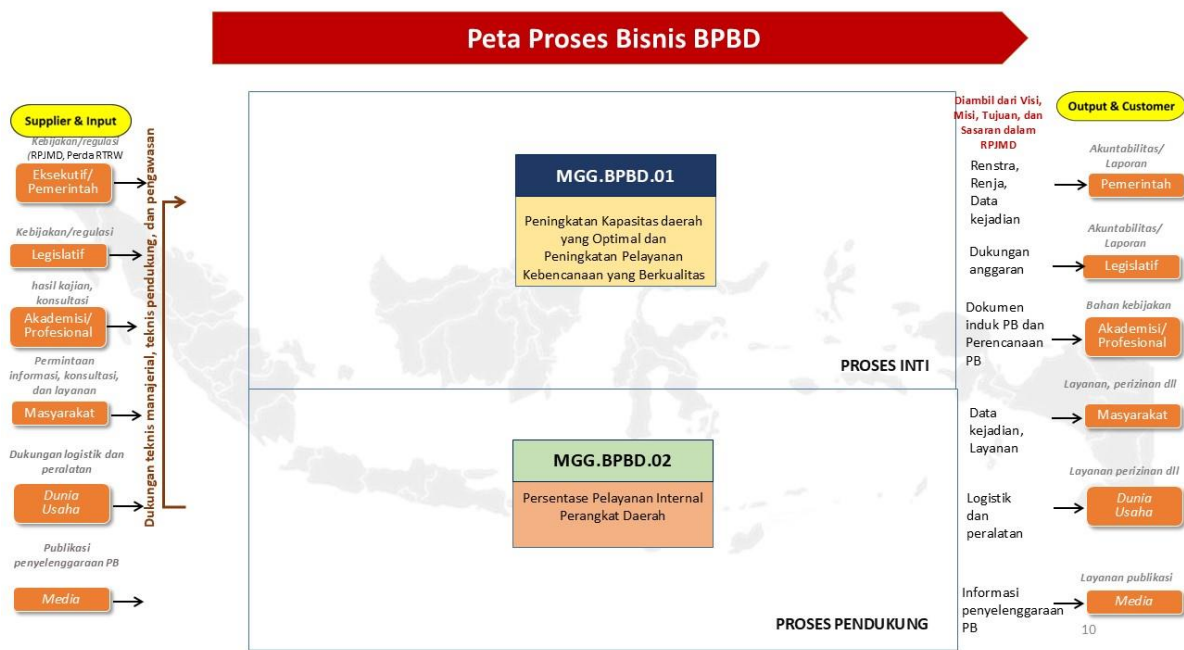
Gambar 1. 1 CASCADING

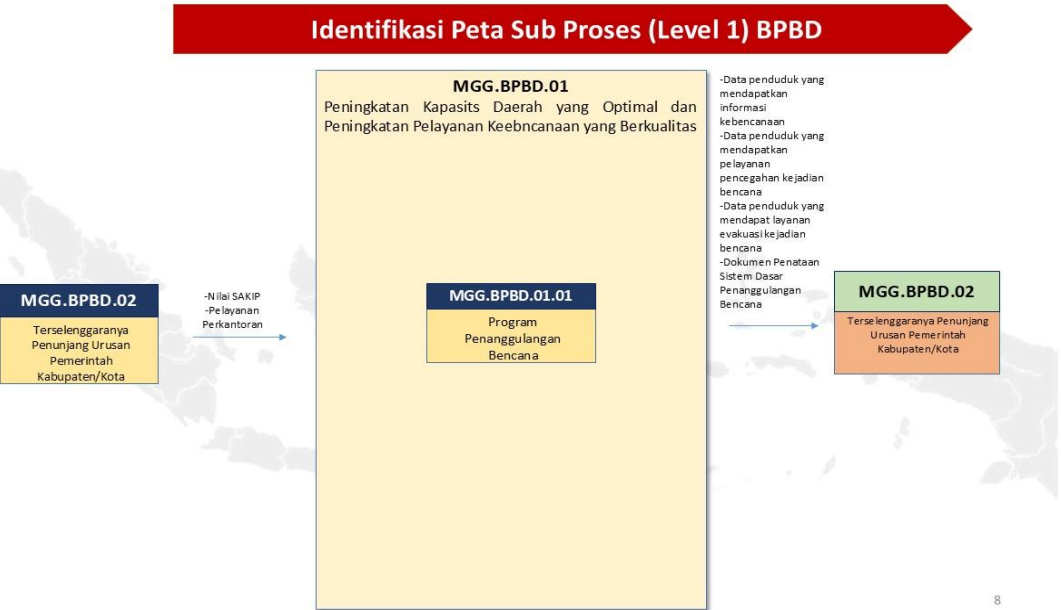


1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Mandat kinerja mengarahkan organisasi untuk mencapai hasil tertentu , peta proses bisnis merupakan alur kerja dalam organisasi yang mengggambarkan proses berjalan serta langkah – langkah yang diperlukan untuk mencapa tujuan sedangkan struktur organisasi menentukanbagaimana informasi dan wewenang mangalir di dalam organisasi sebagaimana proses bisnis dijalankan, struktur organisasi yang jelas dan efektif akan mandukung pancapaian mandat kinerja dengan memastikan setiap bagian organisasi bekerja. Mandat kinerja, peta proses bisnis dan dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambara berikut :

Gambar 1. 2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis BPBD Kota Magelang





IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI					
Peta Sub Proses	Kode Peta Sub Proses	Peta Lintas Fungsi (Level 2)	Kode Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi (Level 3)	Kode Peta Lintas Fungsi
Program Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.04	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.01
				Penanganan Pascabencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.02

IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI					
Peta Sub Proses	Kode Peta Sub Proses	Peta Lintas Fungsi (Level 2)	Kode Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi (Level 3)	Kode Peta Lintas Fungsi
Program Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.03	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.01
				Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.02
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.03
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.04

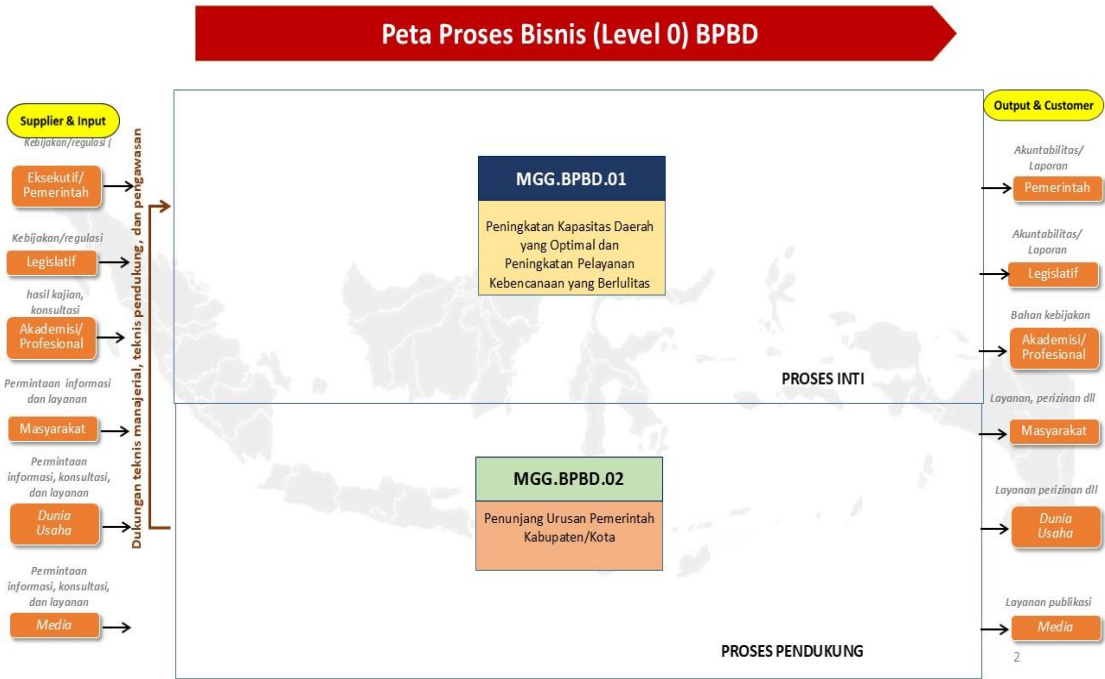
IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI

Peta Sub Proses	Kode Peta Sub Proses	Peta Lintas Fungsi (Level 2)	Kode Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi (Level 3)	Kode Peta Lintas Fungsi
Program Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.01
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.02
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.03
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.04
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.05
				Penyusunan Rencana Kontijensi	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.06
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.07

IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI

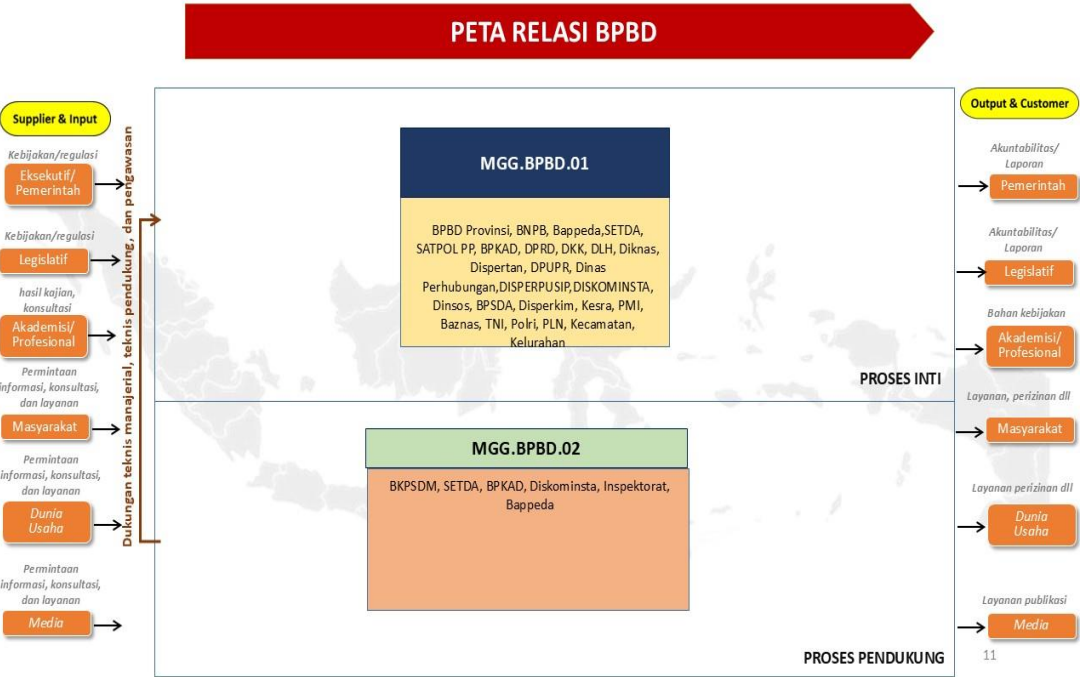
Peta Sub Proses	Kode Peta Sub Proses	Peta Lintas Fungsi (Level 2)	Kode Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi (Level 3)	Kode Peta Lintas Fungsi
Program Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.01.01
				Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.01.02

IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
NO	Peta Proses (Sasaran)	Jenis	Kode Peta Proses	Peta Sub Proses	Kode Peta Sub Proses
1	Peningkatan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Peningkatan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	UTAMA	MGG.BPBD.01	Program Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.01
2	Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Pendukung	MGG.BPBD.02	Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	MGG.BPBD.02.01



Tabel Instrumen Penentuan Proses

No	Misi	Tujuan	Sasaran	IDENTIFIKASI KAU MAT PROSES	JENIS PROSES (Utama/Pendukung/ Lainnya)	Identifikasi Kalimat Sub Proses	KODE PROSES	ORGANISASI TERKAIT
1	Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur	Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Peningkatan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Peningkatan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Proses Utama	Data Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01	BPBD Provinsi, BNPB, Bappeda,SETDA, SATPOL PP, BPKAD, DPRD, DKK, DLH, Diknas, Dispertan, DPUPR, Dinas Perhubungan,DISPERPUSIP, DISKOMINSTA, Dinsos, BPSDA, Disperkim, Kesra, PMI, Baznas, TNI, Polri, PLN, Kecamatan, Kelurahan
2			Meningkatnya Layanan Internal	Peningkatan Layanan Internal	Proses Pendukung	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	MGG.BPBD.02	BKPSDM, SETDA, BPKAD, Diskominsta, Inspektorat, Bappeda

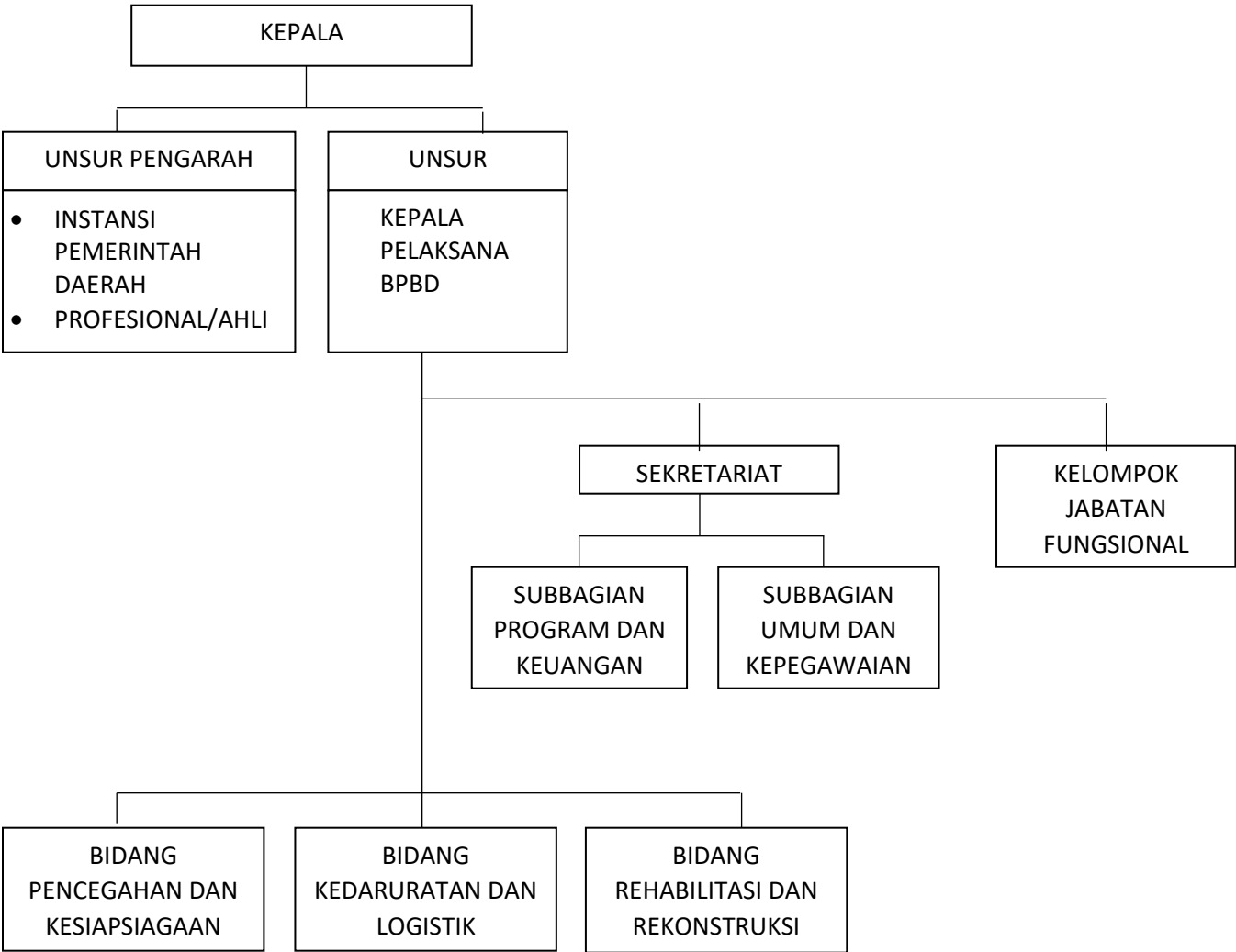


Berdasarkan pasal 5 dan pasal 18 undang- undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan maka Pemerintah Kota Magelang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian sebagai petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah tersebut disusunlan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, sejalan dengan perkembangannya maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah maka BPBD juga mengalami perubahan struktur organisasi diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional maka Struktur Organisasi tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang pun ikut berubah yang diatur di dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang berubahannya tersebut sebagaimana dalam lampiran :

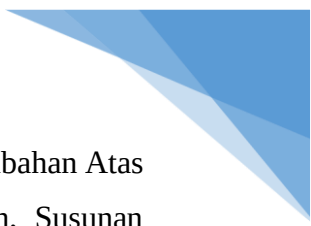
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi BPBD Kota Magelang



Sumber data Perwal Nomor 51 Tahun 2023

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang di atur di dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2023 sebagaimana berikut :



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas : Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Menyusun prosedur tetap bersama untuk pelaksana mengenai bencana dan peta rawan bencana
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Melaksanakan pemantuan penyelenggaraan penanggulangan bencana terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana
5. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
6. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi dan,
7. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana

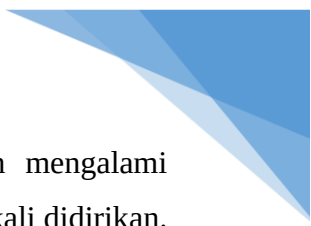
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas : Membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan arahan pimpinan optimalisasi pelaksanaan tugas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah
2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan,
4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Sesuai dengan pelaksanaan tugas fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang dibagi habis ke dalam jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana berdasarkan Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 060/239/112 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan Pemerintah Kota Magelang serta Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang dibagi habis ke dalam Jabatan Struktural dan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut :

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsiona
1. Kepala Badan	1. Dibawah Subbagian	1. 2 Orang
2. Kepala Pelaksana	Program dan Keuangan :	Analisis
3. Sekretaris	1) 3 Orang	Kebencanaan
1) Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Penelaan Teknis Kebijakan	Ahli Muda
2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	2) 3 Orang Pengelola Data dan Informasi	2. 6 Orang penelaah Teknis Kebijakan
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2. Di bawah Subbagian Umum dan Kepegawaian :	3. Penata Layanan Oprasional
5. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1) Penelaah Teknis Kebijakan	4. 8 Orang Pengolah Data dan Informasi
6. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2) Pengelola Layanan Oprasional	5. Operator Layanan Operasional
	3) Pengelola Data dan Informasi	6. Pranata Komputer Terampil
	4) Arsiparis	7. 6 Orang Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula
	5) Pranata SDM Aparatus Terampil	
	6) Pengadministrasi Perkantoran	



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang telah mengalami beberapa kali perubahan dalam susunan organisasi dan tata kerjanya sejak pertama kali didirikan. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk sebagai implematensi daerah atas aturan yang lebih tinggi. BPBD Kota Magelang pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2021. Peraturan ini menjadi landasan awal dalam penyelenggaraan tugas-tugas penanggulangan bencana di kota tersebut. Dalam peraturan tersebut, struktur organisasi dan tata kerja BPBD disusun untuk memastikan adanya koordinasi yang baik, serta memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, , BPBD Kota Magelang kembali melakukan perubahan melalui Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2022. Perubahan yang lebih lanjut terjadi dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2023, yang menjadi peraturan terakhir saat ini yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja BPBD.

Setiap perubahan yang dilakukan dalam struktur organisasi dan tata kerja BPBD Kota Magelang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dalam menghadapi potensi bencana..

1.4 Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Isu Strategis perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kota Magelang 2022-2026 sebagai berikut :

- a. Belum adanya sarana dan prasarana tanggap darurat yang lengkap bagi korban bencana
- b. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pascabencana.

- 
- c. Kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana
 - d. Belum adanya turunan regulasi tentang penanggulangan bencana
 - e. Belum adanya kejelasan job description terkait tugas dan wewenang dengan pihak terkait dalam penanggulangan bencana
 - f. Masih kerap ditemukan ketumpangtindihan terkait wewenang dari pihak yang terlibat
 - g. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
 - h. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi
 - i. Belum terlaksananya edukasi tanggap bencana di lingkungan masyarakat secara menyeluruh
 - j. Masih kurangnya upaya mitigasi, pencegahan , kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana
 - k. Kurangnya kapasitas penanganan masyarakat terdampak bencana
 - l. Kapasitas sarana dan prasarana peralatan dan logistik
 - m. Rendahnya kesadaran masyarakat
 - n. Tidak semua rumah yang dibangun sesuai dengan tingkat kontruksi tahan bencana
 - o. Masih terdapat masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
 - p. Belum tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal
 - q. Minimnya kesadaran masyarakat tentang kerentanan di daerah tempat tinggal
 - r. Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana
 - s. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang peringatan dini bencana
 - t. Belum terbentuknya masyarakat tanggap bencana di setiap keluarahan
 - u. Belum terlaksananya edukasi dan pengetahuan terkait kebencanaan di seluruh lingkungan masyarakat.
 - v. Belum terbentuknya Tim Pengkajian Kebutuhan dan Perhitungan Pascabencana (JITUPASNA)
 - w. Belum adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Sumber Daya Manusia

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang memiliki sumber daya manusia yang berperan sangat gital dalam upaya mitigasi, penanggulangan, pemulihan bencana. Sumber Daya Manusia yang terlatih dan kompeten menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas – tugas penting Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menghadapi situasi darurat.

Pada dasarnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan teknis mengenai penanggulangan bencana, tetapi juga

keterampilan dalam berkoordinasi dengan berbagai instansi, masyarakat, serta pihak lainnya yang terlibat, Selain itu, sumber daya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus memiliki sifat kepemimpinan yang baik, daya tahan fisik dan mental serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat di tengah tekanan situasi bencana.

Tantangan utama dalam mengelola sumber daya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, karena pengetahuan terkait penanggulangan bencana terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola ancaman bencana. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus memastikan bahwa anggotanya mendapatkan pelatihan secara periodik dan dapat mengikuti perkembangan pengetahuan terbaru dalam kebencanaan.

Selain itu, keberagaman latar belakang sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menjadi faktor penting. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memerlukan tenaga dari berbagai bidang, mulai personil yang memiliki latar belakang teknik, kesehatan, penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membangun kerjasama yang solid dengan masyarakatn, hingga komunikasi dan manajemen. Dalam konteks ini, kolaborasi antar berbagai disiplin ilpu akan meningkatkan efekyivitas dalam merespon bencana. Disamping itu, penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membangun kerjasama yang solid dengan masyarakat. Masyarakat yang terlatih dan memiliki pengetahuan dasar tentang kesiapsiagaan bencana akan mempercepat proses evakuasi dan pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan strategi penguatan sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Existing Sumber daya manusia (SDM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompentensi

No	Jabatan	Formasi							Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi						Jml	Kualifikasi						L	P
			S3	S2	S1/D4	D3	D1	SMA/SMK		S3	S2	S1/D4	D3	D1	SMA/SMK		
1	Kepala Pelaksana				1				1			1				1	
2	Sekretaris				1				1			1				1	
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan				1				1			1				1	
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik				1				1		1					1	
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi				1				1			1				1	
6	Kasubbag Program dan Keuangan				1				1			1					1

7	Ka Subbgag Umum & Kepegawaian				1				1			1				1	
8	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda				4				3			3				1	2
9	Analisis Kebencanaan Ahli Muda				2				2			2				2	
10	Penelaah Teknis Kebijakan				12				1			1					1
12	Pengelola Layanan Operasional					1			1				1				1
13	Pengolah Data dan Informasi					11			2				1		1	1	1
14	Pranata Komputer Terampil					1			1				1				1
15	Arsiparis Terampil					1			1				1				1
16	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula							6	1				1			1	
17	Pranata SDM Aparatur Terampil					1											
18	Pengadministrasi Perkantoran							1	1						1	1	
19	Operator Layanan Operasional							1									

Sumber Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 060/239/112 Tahun 2024 dan Data Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024

Sarana Prasarana

Sarana prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah memainkan peran krusial dalam mendukung kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai akan menentukan kecepatan, efektivitas, dan efisiensi dalam penanganan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memerlukan fasilitas dan peralatan yang dapat mendukung operasional dalam berbagai fase penanggulangan bencana, mulai mitigasi, kesiapsiagaan sampai pascabencana. Sarana yang di perlukan antara lain seperti pusat komando, komunikasi yang dapat mengkoordinasikan tim di lapangan, posko bencana yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pengungsian sementara bagi masyarakat terdampak, serta fasilitas penyimpanan alat logistik yang dibutuhkan untuk mendukung operasi penanggulangan bencana.

Selain itu, fasilitas teknologi informasi seperti system peringatan dini dan jaringan komunikasi yang dapat memberikan informasi terkini mengenai bencana yang terjadi.

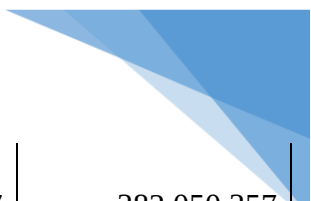
Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan selalu siap digunakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat lebih cepat dan efektif dalam merespon bencana, melindungi masyarakat dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. 2 Sarana Prasarana

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3	ASET TETAP	228.519.356.942	267.356.644.942
1.3.01	Tanah	712.000.000	712.000.000
1.3.01.01	Tanah	712.000.000	712.000.000
1.3.01.01.01	Tanah Persil	712.000.000	712.000.000
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	712.000.000	712.000.000
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.028.830.932	3.000.684.932
1.3.02.01	Alat Besar	111.063.000	101.350.000
1.3.02.01.03	Alat Bantu	111.063.000	101.350.000
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	104.063.000	94.350.000
1.3.02.01.03.0005	Pompa	7.000.000	7.000.000
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.668.754.750	1.668.754.750
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.668.754.750	1.668.754.750
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	748.254.000	748.254.000
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	774.466.000	774.466.000
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	146.034.750	146.034.750
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	17.313.000	8.400.000
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	17.313.000	8.400.000
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	17.313.000	8.400.000
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	577.396.957	571.076.957
1.3.02.05.01	Alat Kantor	158.435.501	152.115.501
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	70.237.501	63.917.501
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	88.198.000	88.198.000
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	350.682.856	350.682.856
1.3.02.05.02.0001	Mebel	177.405.000	177.405.000
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	3.975.000	3.975.000
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	65.631.200	65.631.200
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	6.733.000	6.733.000
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	93.283.000	93.283.000
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	3.655.656	3.655.656
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	68.278.600	68.278.600
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	25.587.300	25.587.300
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	2.670.000	2.670.000
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	4.665.000	4.665.000
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	6.541.800	6.541.800
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	28.814.500	28.814.500
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	248.743.000	245.543.000
1.3.02.06.01	Alat Studio	54.143.000	54.143.000
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	5.720.000	5.720.000
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	48.423.000	48.423.000
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	194.600.000	191.400.000
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	161.600.000	158.400.000
1.3.02.06.02.0008	Alat Komunikasi Khusus	8.000.000	8.000.000

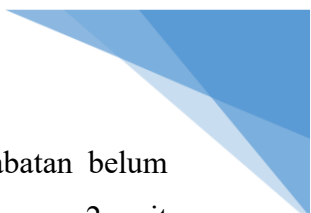
1.3.02.06.02.0009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	25.000.000	25.000.000
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	750.000	750.000
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	750.000	750.000
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	750.000	750.000
1.3.02.10	Komputer	352.010.225	352.010.225
1.3.02.10.01	Komputer Unit	288.365.725	288.365.725
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	288.365.725	288.365.725
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	63.644.500	63.644.500
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	63.644.500	63.644.500
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	52.800.000	52.800.000
1.3.02.15.03	Alat SAR	52.800.000	52.800.000
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	52.800.000	52.800.000
1.3.03	Gedung dan Bangunan	926.348.000	926.348.000
1.3.03.01	Bangunan Gedung	926.348.000	926.348.000
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	926.348.000	926.348.000
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	865.319.550	865.319.550
1.3.03.01.01.0036	Taman	61.028.450	61.028.450
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.271.510	36.271.510
1.3.04.02	Bangunan Air	29.478.650	29.478.650
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	29.478.650	29.478.650
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	29.478.650	29.478.650
1.3.04.03	Instalasi	5.842.860	5.842.860
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.842.860	5.842.860
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.842.860	5.842.860
1.3.04.04	Jaringan	950.000	950.000
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	950.000	950.000
1.3.04.04.03.0005	Jaringan Telepon Lainnya	950.000	950.000
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.418.256.872,58)	(2.001.737.992,58)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.123.390.867,31)	(1.723.338.496,31)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(44.823.285,86)	(28.957.142,86)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(41.823.285,86)	(26.957.142,86)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	-3.000.000	-2.000.000
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.074.692.749,45)	(912.863.321,45)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(591.739.713,86)	(552.611.142,86)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(378.412.571,43)	(267.774.571,43)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(104.540.464,16)	(92.477.607,16)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-4.251.300	-1.680.000
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	-4.251.300	-1.680.000



1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-460.595.757	-382.050.357
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-50.047.301	-39.504.301
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-73.735.000	-61.350.000
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	-135.127.200	-105.189.400
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-2.385.000	-1.590.000
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-55.403.200	-47.165.200
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	-4.769.800	-3.788.200
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-72.474.000	-62.089.000
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	-3.655.656	-3.655.656
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-25.587.300	-25.587.300
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	-2.670.000	-2.670.000
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-4.665.000	-4.665.000
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	-6.541.800	-6.541.800
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	-23.534.500	-18.254.500
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-183.746.800	-134.638.200
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-3.432.000	-2.288.000
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-33.794.800	-24.110.200
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	-126.720.000	-95.040.000
1.3.07.01.06.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	-4.800.000	-3.200.000
1.3.07.01.06.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-15.000.000	-10.000.000
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-750.000	-600.000
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-750.000	-600.000
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	-301.730.975	-236.149.475
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	-243.440.725	-190.459.475

1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-58.290.250	-45.690.000
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-52.800.000	-26.400.000
1.3.07.01.15.0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	-52.800.000	-26.400.000
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(281.800.248,02)	(266.312.967,02)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(281.800.248,02)	(266.312.967,02)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(261.234.558,02)	(246.967.846,02)
1.3.07.02.01.0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	-20.565.690	-19.345.121
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(13.065.757,25)	(12.086.529,25)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(9.336.827,25)	(8.599.861,25)
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(9.336.827,25)	(8.599.861,25)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	-2.921.430	-2.726.668
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-2.921.430	-2.726.668
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-807.500	-760.000
1.3.07.03.04.0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	-807.500	-760.000
	JUMLAH ASET TETAP	2.285.193.569,42	2.673.566.449,42
1.5	ASET LAINNYA	53.886.060,00	53.886.060,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	89.810.100,00	89.810.100,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	89.810.100,00	89.810.100,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	89.810.100,00	89.810.100,00
1.5.03.01.01.0005	Software	89.810.100,00	89.810.100,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(35.924.040,00)	(35.924.040,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(35.924.040,00)	(35.924.040,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(35.924.040,00)	(35.924.040,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(35.924.040,00)	(35.924.040,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	53.886.060,00	53.886.060,00
	JUMLAH ASET	2.346.646.329,42	2.764.156.776,42

Saat ini, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang untuk mendukung operasional rutin terdiri dari kendaraan operasional lapangan, yakni 1 unit mobil double gardan dan 1 unit pick up. Sementara itu, kendaraan dinas jabatan terdiri dari 3 unit kendaraan roda 4, dengan perincian 1 unit untuk



eselon 2 dan 2 unit untuk eselon 3. Namun, kebutuhan kendaraan dinas jabatan belum sepenuhnya merata, di mana untuk jabatan eselon 3 masih terdapat kekurangan 2 unit kendaraan roda 4. Untuk perlengkapan kantor, saat ini sudah cukup memadai, seperti meja dan kursi kerja. Namun, terdapat kebutuhan tambahan berupa penyediaan gudang peralatan yang lebih memadai, lengkap dengan rak dan lemari, gudang yang dimiliki saat ini kapasitasnya kurang mencukupi

Anggaran

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang merupakan komponen penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan tugas – tugas penanggulangan bencana di tingkat daerah. Anggaran yang dialokasikan harus mencakup berbagai kebutuhan , mulai persiapan dan mitigasi, hingga respon dan pemulihan pascabencana. Oleh karena itu pengelolaan anggaran yang tepat dan efisien sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Sebagian anggaran digunakan untuk pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana, pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia baik masyarakat maupun personal internal BPBD Kota Magelang, serta penyediaan dana yang digunakan untuk kedaruratan, disamping anggaran pendukung yang masuk dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggaran juga mencakup biaya pemeliharaan dan perawanan peralatan yang digunakan dalam penanggulangan bencana , seperti, kendaraan operasional, dan peralatan kebencanaan lainnya.

Selain itu, anggaran BPBD juga diperlukan untuk membiayai kegiatan mitigasi bencana yang bertujuan mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. Kegiatan ini idealnya mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, seperti pembangunan bendungan, sistem drainase, dan penguatan bangunan. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara hati-hati agar dapat menjalankan program-program mitigasi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pengelolaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus transparan dan akuntabel. Karena dana yang dikelola, penggunaan anggaran tersebut harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan dana. Pemerintah daerah dan masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan ini untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari sektor swasta, maupun organisasi masyarakat, untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan. Hal ini akan sangat membantu dalam

menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih baik dan lebih efektif, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, anggaran yang cukup, dikelola dengan baik, dan dialokasikan dengan tepat akan sangat menentukan keberhasilan BPBD dalam melakukan tugasnya. Dengan anggaran yang memadai, BPBD dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana bagi masyarakat.

Berikut dapat dilihat table anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 1. 3 Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024							
Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	Bertambah / Berkurang)	
						Rp	%
4			PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
4	1	02	Retribusi Daerah	-	-	-	-
			Dst....	-	-	-	-
			Jumlah Pendapatan	-	-	-	
5			BELANJA DAERAH	Rp4.574.490.026	Rp4.563.895.679	- Rp10.594.347	(0,23)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp4.574.490.026	Rp4.563.895.679	- Rp10.594.347	(0,23)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.143.548.197	Rp3.344.270.370	Rp200.722.173	6,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.430.941.829	Rp1.219.625.309	- Rp211.316.520	(17,33)
5	2		BELANJA MODAL	Rp53.518.200	Rp28.543.200	- Rp24.975.000	(87,50)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp38.543.200	Rp28.543.200	- Rp10.000.000	(35,03)
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp14.975.000	Rp0	- Rp14.975.000	(100,00)

			Jumlah Belanja	Rp4.574.490.026	Rp4.563.895.679	- Rp10.594.347	(0,23)
			Total Surplus/Defisit	- Rp4.574.490.026	- Rp4.563.895.679	- Rp10.594.347	(0,23)
6			PEMBIAYAAAN	-	-	-	-
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
			Pembiayaan Neto	-	-	-	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan pada program kegiatan dan sub-kegiatan. Beberapa sub-kegiatan yang masuk dalam usulan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, pada tahap verifikasi desk Renja, justru dihapus. Selain itu, beberapa sub-kegiatan mengalami rasionalisasi. Perkembangan-perkembangan tersebut merupakan dampak dari kebijakan daerah, di mana terdapat defisit anggaran daerah yang mengakibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdampak. Anggaran penetapan semula sebesar Rp 4.628.008.226,- mengalami penurunan pada anggaran perubahan menjadi Rp 4.592.438.879,- atau turun sebesar 0,77%. Salah satu sub-kegiatan yang sangat dibutuhkan namun tidak terealisasi adalah pengembangan aplikasi Sistem Kentongan, yang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam meningkatkan mendukung sistem peringatan dini.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan penanggulangan bencana. Evaluasi SAKIP memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan identifikasi terhadap area – area yang memerlukan perbaikan. Langkah dalam tindak lanjut evaluasi SAKP adalah melakukan analisis terhadap temuan dan rekomendasi. Evaluasi SAKIP dapat mengungkap adanya celah , kekurangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang dapat menghambat efektivitas penanggulangan bencana. Dalam hal pengawasan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga harus memastikan bahwa tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dilaksanakan secara keseluruhan serta pengawasan terhadap inplementasi perbaikan harus dilakukan secara periodik.

Adapun Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan tindak lanjut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Menyelaraskan Tujuan, Sasaran dan Indikator Resntra dengan IKU dan PK	Akan disesuaikan pada penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Magelang 2025 - 2029
2	Tepat waktu dalam melaksanakan evaluasi capaian kinerja IKU, Program da/Kegiatan/Sib Kegiatan	Telah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan setiap triwulan

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- Bab II berisi :*
1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah*
 2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
 3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun (n)*
 4. *Perjanjian Kinerja Tahun (n)*
 5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja*

Rencana Strategis adalah dokumen perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang baru disusun pada tahun 2022 hal ini disebabkan karena keberadaan BPBD Kota Magelang yang baru berdiri pada tahun 2022. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan (RENJA SKPD) dimana penyusunan renja merupakan bentuk pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah yang oleh perangkat daerah. Visi Kota Magelang 2021 s.d 2026 “Maju

Sehat dan Bahagia” sebagai dasar perumusan misi Kota Magelang :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021 – 2026 Badan Pananggulangan Bencana Daerah Kota Magelang mendukung salah satu tujuan dan sasaran dari Misi ke-5 yaitu:

- Misi ke-5 : Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur
- Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Daerah
- Sasaran : Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2022 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Baseli ne	TARGET TAHUNAN					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatny a Ketahanan Daerah (bencana)		Indeks Ketahanan Daerah	0	0	22.90	33.20	47.40	57.40	66.80
		Meningkatny a Kapasitas Penanggulan gan Bencana	Jumlah Tercapainya Tujuh Prioritas	0	0	22.90	33.20	47.40	57.40	66.80

Berdasarkan laporan hasil review LkjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2023 maka dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama, sehingga Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang diubah menjadi :

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana Daerah
	Mewujudkan Kapasitasn Penanggulangan Bencana yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Lebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan sebuah tindakan dalam proses perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan adalah pedoman dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

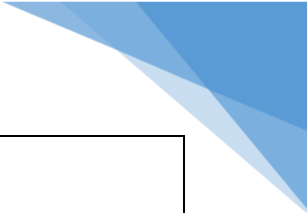
1	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Mewujudkan Kapasitasn Penanggulangan Bencana yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Lebencanaan yang Berkualitas	1. Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan	1. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana
		2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	2. Meningkatkan pembentukan kelurahan tangguh bencana
		3. Pengembangan sistem informasi	3. Peningkatan kapasitas sumbedaya dalam penanggulangan bencana
		4. Optimalisasi penanganan serta pengembangan sistem pemulihan bencana	4. Peningkatan koordinasi lintas sektor

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

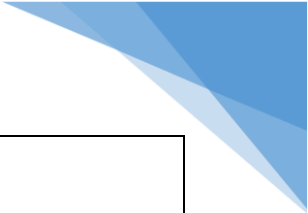
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yaitu :

Tabel 2. 3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah /Berkurang
Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	1.05.03 Program Penangggulangan Bencana	904.806.390	725.165.392	-179.640.998
	2.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	59.479.400	25.822.800	-33.656.600
	2.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Ancaman Bencana	59.479.400	25.822.800	-33.656.600
	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	570.358.890	476.247.512	- 94.111.378
	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	117.928.800	26.735.800	-91.193.000
	1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC	49.475.250	18.312.100	-31.163.150



	Bencana Kabupaten/Kota			
	1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	76.773.600	75.609.900	-1.163.700
	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	13.573.000	35.2229.100	21.656.100
	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	55.440.700	55.440.700	0
	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	66.669.100	56.399.100	-10.270.000
	1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	190.498.440	208.520.812	18.022.372
	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	225.890.440	198.937.180	-26.953.020
	1.05.03.2.03 .0001 Respon Cepat	5.946.600	5.946.600	0



	Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			
	1.05.03.2.03 .0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	150.742.320	148.515.300	-2.227.020
	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	11.000.000	3.500.000	-7.500.000
	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	32.621.280	32.621.280	0
	1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	25.580.000	8.354.000	-17.226.000
	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	49.077.900	24.157.900	-24.920.000
	1.05.03.2.04 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	49.077.900	24.157.900	-24.920.000
Total Anggaran yang mendukung sasaran		904.806.390	725.165.392	-179.640.998

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen perjanjian kinerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Magelang merupakan pernyataan komitmen Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Magelang tentang target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Adapun Target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang Tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2		3	4	5
1	Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana Daerah	Nilai	98.25
2		Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	41

Untuk mendukung target sasaran yang menjadi tanggung jawab Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang terdapat anggaran yang langsung mendukung yaitu Program penanggulangan Bencana dan program yang mendukung target sasaran tahun 2024 dapat di sajikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penanggulangan Bencana	904.806.390
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.723.201.836
Jumlah Anggaran		

	4.628.008.226
--	---------------

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Pelaksanana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024:

Tabel 2. 5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

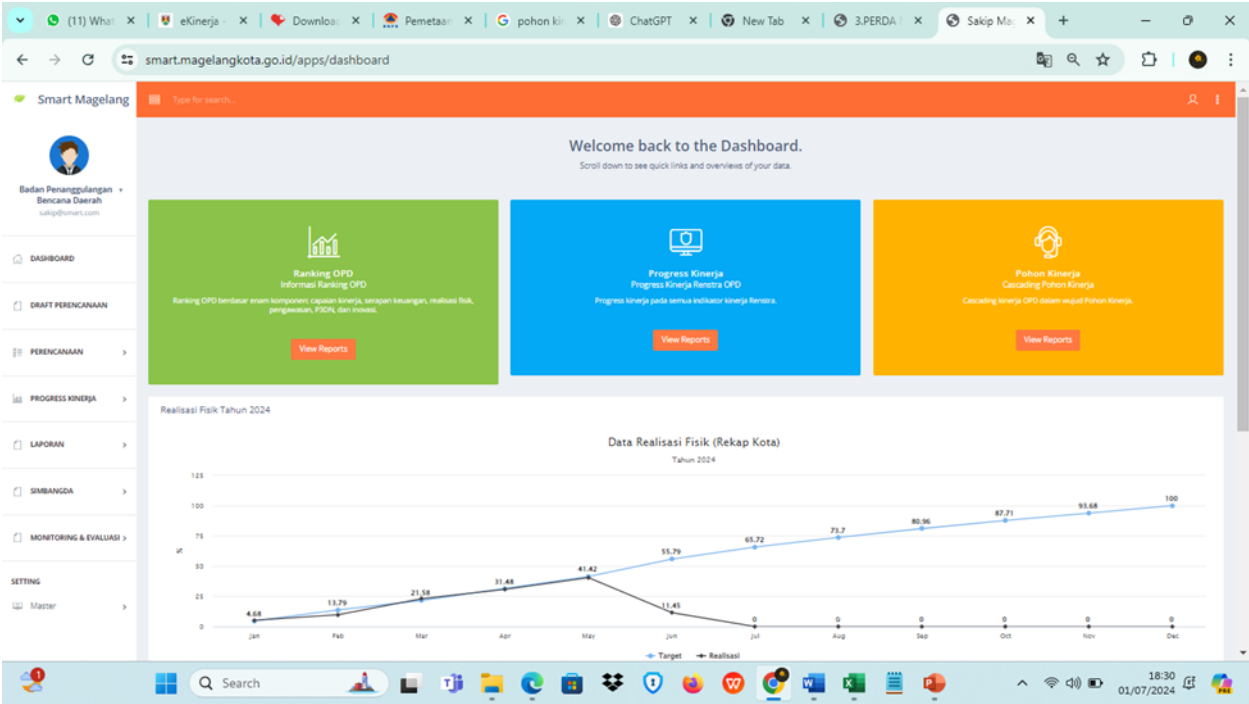
NO	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	Nilai	98.25
2	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	41

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penanggulangan Bencana	725.165.392
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.867.273.487
Jumlah Anggaran		4.628.008.226

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

- a. Instrumen pendukung penerapan SAKIP Kota Magelang adanya sebuah Aplikasi yang dibangun yaitu smart.magelang.go.id , yang bertujuan untuk mengintegrasikan dari perencanaan sampai dengan pengawasan, yang dapat dipantau setiap saat :

Gambar 2. 1 SMART MAGELANG

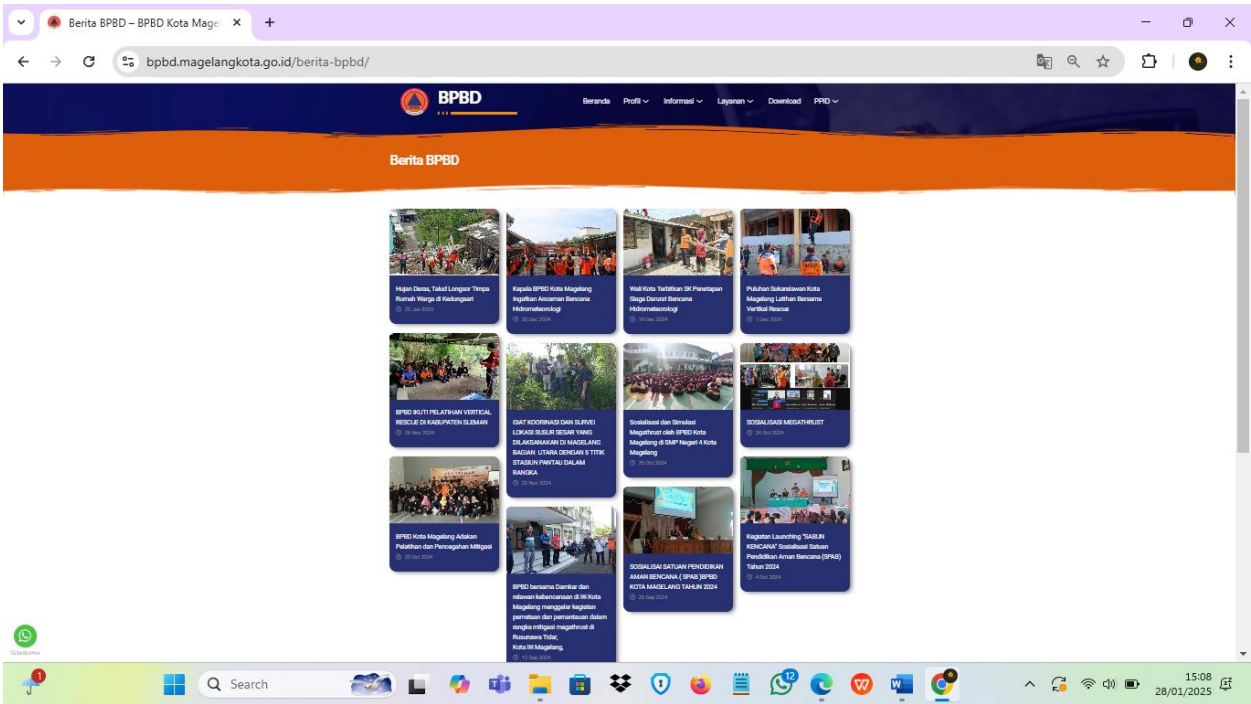


The 'Rapor SKPD' page displays a table of performance indicators for the year 2024. The table includes columns for No, Aspek, Nilai Dasar, Koefisien, Bobot, Nilai Akhir, Uraian Load, Catatan, Rekomendasi, Tindak Lanjut, Built Dukung, Catatan Verif, and Status.

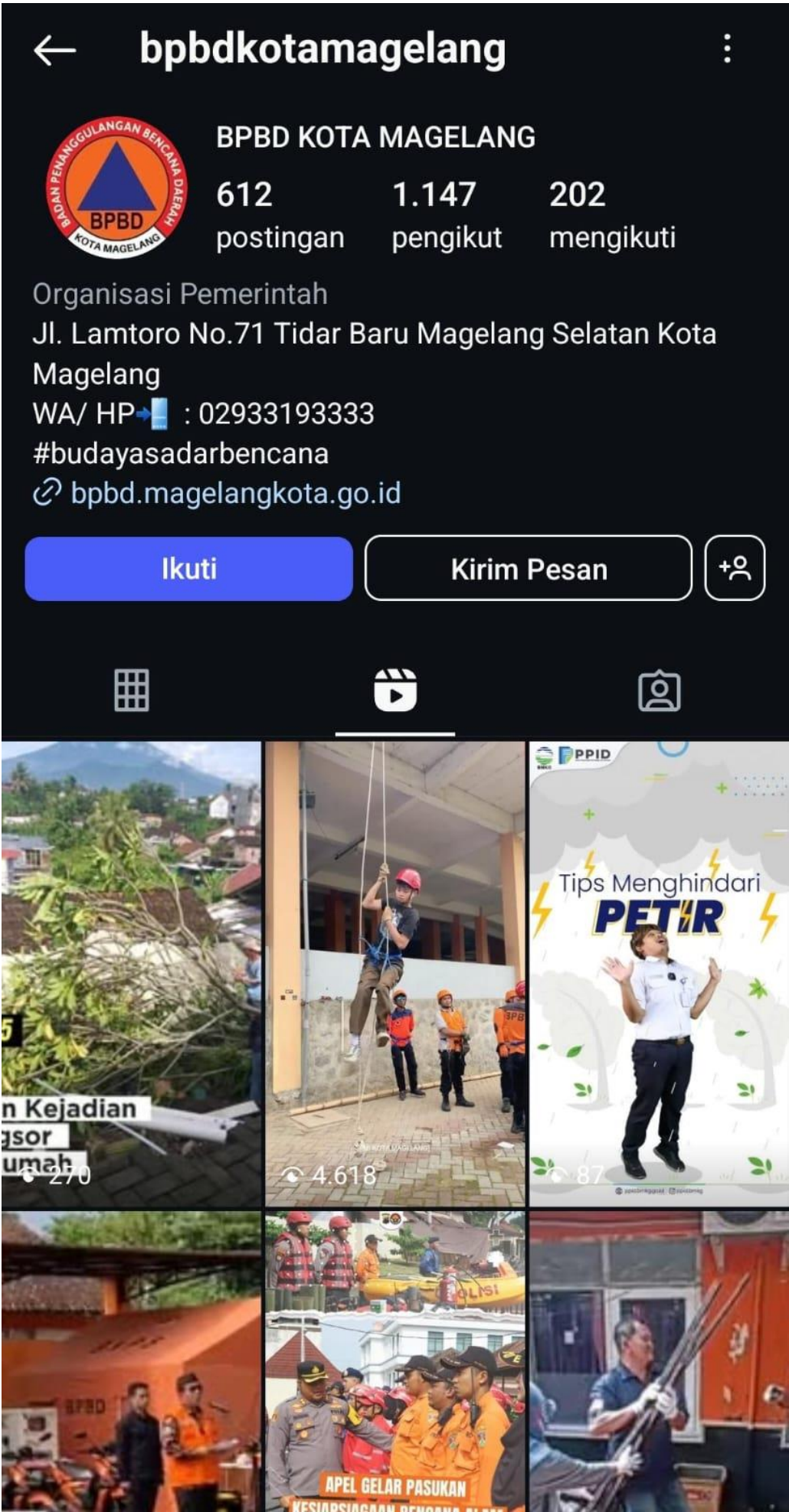
No	Aspek	Nilai Dasar	Koefisien	Bobot	Nilai Akhir	Uraian Load	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Built Dukung	Catatan Verif	Status
1	Capaian Kinerja	100.00	5	35	35.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Anggaran faktor penunjang / pengembang (gis aktif)	-	Nilai RD m-2024	▲	terima kasih	Green
2	Serapan Keuangan	96.31	5	20	19.26	BADAN PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH	serapan sudah bagus	perbahasan di tahun 2025	Realisasi keuangan m-2024	▲		Red
3	Realisasi Fisik	100.00	15	15.00	SEKRETARIAT DAERAH	Capaian sudah baik	Perbahasan di tahun 2025	Alasan diupayakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian realisasi Fisik dengan memperhatikan kegiatan kerja awal tahun dan melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan		▲	Pantau dan kendalikan bersama	Green
4	Pengawasan	80.00	10	8.00	INSPEKTORAT	Terpenuhi sudah ditindaklanjuti	Tingkatkan cakupan yang baik	more 2024		▲		Red
5	PISDN	90.00	5	10	9.00	SEKRETARIAT DAERAH	Capaian sudah bagus, melampaui target lebih namun belum sesuai dengan komitmen yang sudah ditetapkan	Tingkatkan untuk tahun berikutnya		▲		Red
6	Inovasi	70.00	3	10	7.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sesuai inovasi 2025 dan built dukungnya	Perhatikan built dukung regulasi inovasi, tm pengkulu dan tm pelaksanaan inovasi 2025		▲		Red
Total Nilai:					93.34							

b. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Lainnya

Gambar 2. 2 Website BPBD



Gambar 2. 3 Instagram BPBD



Gambar 2. 4 Twitter/X BPBD



← Posting

📌 Disematkan



BPBD Kota Magelang
@BPBDKotaMgl

Ikuti

Peringatan Hari Kesiapsiagaan
Bencana, 26 April 2023 di BPBD Kota
Magelang. Siap Untuk Selamat. Mari
kita tingkatkan ketangguhan desa,
untuk mengurangi resiko bencana.

#salamtangguh
#salamkemanuisaan
#salamsiaga



11:22 · 26 Apr 23 · **214** Tayangan





Bab III berisi :

- 1. *Capaian kinerja tahun 2024*
- 2. *Capaian Kinerja Lainnya*
- 3. *Realisasi Anggaran*
- 4. *Inovasi*
- 5. *Lintas sektor*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaan/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. BPBD melaksanakan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. Definisi Bencana menurut undang-undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulanga Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis :

- 1. Bencana alam : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsonr
- 2. Bencana non alam : bencana yang diakibatkan ooleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan atau wabah penyakit.
- 3. Bencana sosial : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pada perencanaan tahun 2024 BPBD Kota Magelang guna mendukung capaian sasaran OPD melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan, namun begitu guna mencapai sasaran memenuhi pelayanan dasar sampai dengan dengan akhir periode perencanaan jangka menengah masih perlu adanya dukungan anggaran lebih.

Sepanjang tahun 2024 kejadian bencana di Kota Magelang terdapat 56 kejadian Dimana 15 diantaranya merupakan akibat kebakaran lahan,. Jika dilihat dari dampak negatif akibat bencana di Kota Magelang tidak dalam skala besar namun karena menurut IRBI Kota Magelang termasuk dalam Resiko Sedang, maka perlu adanya upaya agar Indeks Risiko Bencana di Kota Magelang turun. Menurut hasil penilaian IKD dan IRBI tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Nasisonal Penanggulangan Bencana dengan surat nomor B-06.13/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 tanggal 8 januari

2025 dan disampaikan kepada seluruh perencana OPD di Jawa Tengah via grup WA pada tanggal 10 Januari 2024. IRBI Kota Magelang tahun 2023 turun sebesar 8.73 dari 102.08 pada tahun 2023 menjadi 93.35 pada tahun 2024, sedangkan IKD Kota Magelang naik 9 dari 0.39 pada tahun 2023 menjadi 0.48 pada tahun 2024.

Pengkajian Risiko Bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Secara matematis, perhitungan potensi risiko dapat dilihat pada rumus berikut:

$$\text{Risiko} = \text{HAZARD} \times \frac{\text{VULNERABILITY}}{\text{CAPACITY}}$$

Dimana Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magtitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dll.

Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian Resiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan Sistem pemulihan bencana

Penilaian Indesk Risiko Bencanan diukur utamanya berdasarkan perubahan pada komponen kapasitas. Nilai Kapasitas berdasarkan pengukuran Indeks Kapasitas Daerah (IKD), sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan Nilai Kapasitas Daerah Tinggi berbanding terbalik dengan hasil penilaian Indeks Risiko Bencana, dengan pencapaian nilai Indeks Ketahanan Daerah tinggi maka nilai Risiko Bencana menjadi turun.

Hasil penilaian dan informasi tingkat risiko bencana dapat digunakan untuk menganalisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasional penanggulangan bencana. Hasil penilaian dari Indeks Risiko Bencana juga memberikan gambaran capaian program penanggulangan bencana yang sudah dilakukan di tingkat daerah , berupa penurunan risiko bencana.

Hasil penilaian Kapasitas Daerah sesuai dengan portal yang dimiliki oleh BNPB bahwa Kapasitas Daerah Kota Magelang pada tahun 2022 masih dalam kategori rendah, hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat BPBD Kota Magelang baru berdiri pada tahun 2022 dengan kapasitas SDM, Sarana Prasarana yang masih rendah, namun seiring dengan berdirinya BPBD pada awal tahun 2022, nilai Kapasitas Daerah menjadi naik, dalam kategori **sedang**.

Pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Analisis capaian kinerja Indikator Kinerja Utama dari hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang pelaksanaannya di lakukan setiap, untuk pencapaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Penilaian pengukuran kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cata Perencaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Baseline % Capaian	Th 2022			Th 2023			Th 2024		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan : Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	Nilai	108	108	108	100%	108	102.08	94.52%	84.98	93.35	109.85 %
	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	37.30	22.90	35	152.84 %	33,20	39	117.47 %	47.40	48	101.27 %

Analisis capaian kinerja sasaran “Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas” dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Kinerja sasaran Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas diukur dengan hasil / akumulasi dari setiap jawaban dan data dukung dalam pemenuhan dokumen dalam setiap prioritas / parameter INDEKS KETAHANAN DAERAH yang terdiri dari 7 prioritas/parameter, 71 indikator, yang telah ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci. Struktur pertanyaan kunci dibuat secara bertingkat, dengan pertanyaan kunci 1 dan 2 menghasilkan Output dan pertanyaan 3 dan 4 menghasilkan Outcome. Pertanyaan tidak bisa dilanjut jika pertanyaan kunci sebelumnya tidak terjawab atau dijawab “ tidak “ . Urutan pertanyaan kunci menjadi hal yang absolut dan tidak bisa dilewati.

Sedangkan rumusan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	1. Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan yang terdiri dari sembilan indikator 9 indikator
			2. Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan yang terdiri dari 4 indikator
			3. Indeks Pengembangan Sistem Informasi , Diklat dan Logistik yang terdiri dari 13 indikator
			4. Indeks Penangana Temasik Kawasan Rawan Bencana yang terdiri dari 5 indikator
			5. Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang terdiri dari 12 indikator
			6. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang terdiri dari 24 indikator

			7. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana yang terdiri dari 4 indikator
--	--	--	---

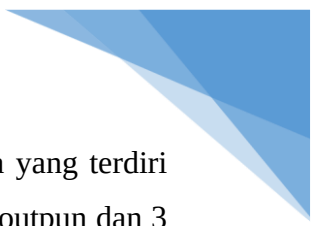
Kinerja sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas pada tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran

No	Indikator Sasaraan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	25	44.70	48	101.27%	66.80	139.17

Analisis terhadap sasaran “Meningkatnya Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas” adalah sebagai berikut :

1. Pada prioritas 1 Perkatan Kebijakan dan Kelembagaan yang terdiri dari 9 indikator , dari enam indikator tersebut diturunkan menjadi 36 pertanyaan yang menghasilkan 7 output serta 5 outcome dengan nilai akhir 0.79
2. Pada prioritas 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu yang terdiri dari 4 indikator, diturunkan menjadi 16 pertanyaan yang menghasilkan 4 output dan 3 outcome dengan nilai akhir 0.70
3. Pada prioritas 3 Pengembangan Sistem Informaso, Diklat dan Logistik terdiri dari 13 indikator diturunkan menjadi 52 pertanyaan yang mnghasilkan 12 output dan 5 outcome dengan nilai akhir 0.63
4. Pada prirotas 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana yang terdiri dari 5 indikator , dturunkan menjadi 20 pertanyaan, yang menghasilkan 5 output dan 3 outcome dengan nilai akhir 0.75

- 
5. Pada prioritas 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang terdiri dari 12 indikator , diturunkan menjadi 48 pertanyaan, yang menghasilkan 4 output dan 3 outcome dengan nilai akhir 0.44
 6. Pada prioritas 6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang terdiri dari 24 indikator, diturunkan menjadi 96 pertanyaan, menghasilkan 5 output dan 1 outcome dengan nilai akhir 0.34
 7. Pada prioritas 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana yang terdiri 4 indikator , yang diturunkan menjadi 16 pertanyaan, menghasilkan 2 output dan belum ada realisasi outcome dari dengan nilai akhir 0.36

Didalam pencapaian target kinerja sasaran perangkat daerah yang ditetapkan, terdapat hambatan dan faktor pendukung keberhasilan yang dapat memperlambat capaian target, namun juga terdapat faktor pendukung yang dapat mempercepat pencapaian sasaran tersebut sehingga sasaran perangkat daerah dapat terwujud sesuai target dan bukan tidak mungkin akan melampaui target.

Adapun faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Faktor penghambat :

1. Kapasitas sumber daya, baik anggaran, SDM maupun sarana dan Prasarana
2. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor
3. Keterbatasan data dan Informasi

Sedangkan faktor pendukung antara lain :

1. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas sektor sehingga dapat menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi
2. Komitmen aparatur BPBD dalam penanggulangan bencana
3. Partisipasi kelompok masyarakat dalam penanggulangan bencana

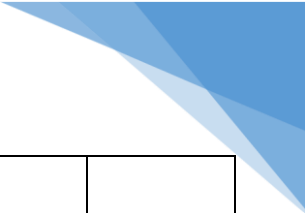
Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penanggulangan bencana merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, respon, serta rehabilitasi pascabencana, guna mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat. Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 5 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran

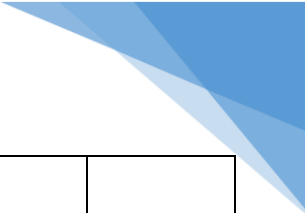
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Progran Penanggulangan Bencana		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	725.165.392	689.397.874	95.07%	4.93%
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	25.822.800	25.763.500	99.77%	2.35%
	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancamanbencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	120 Orgn	120 Org	100%	25.822.800	25.763.500	99.77%	2.35%
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsisgaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	476.247.512	471.573.774	99.02%	0.98%
	1	Penguatan Kapasitas Kawasan	Jumlahkawasanrawanbencana(per jenis ancaman bencana) dan/atau	2 Kawasan	2 Kawasa	100%	26.735.800	24.902.000	93.14%	6.86%

			untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana							
		2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	30 Orang	100%	18.312.100	18.158.600	99.16%	0.84%
		3	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	75.609.900	74.466.870	98.49%	1.51%
		4	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warganegara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	175 Org	175 Orang	100%	35.229.100	34.919.050	99,12%	0.88%

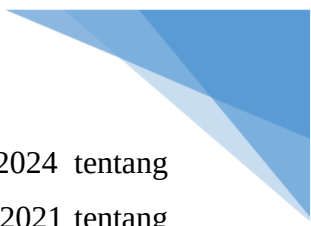
		5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	JumlahPeralatanPenyelamatanDiri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20 Unit	20 Unit	100%	55.440.700	54.945.960	99.11%	0.89%
		6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihanpencegahandan mitigasi bencan	2 Kawasan	2 Kawasan	100%	56.399.100	56.160.650	99.58%	0.42%
		7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	12 Laporan	100%	208.520.812	208.020.644	99.76%	0.02%
	3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	198.937.180	168.559.200	84.73%	15.27%



		1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 Laporan	4 Laporan	100%	5.946.600	5.918.000	99.52%	0.48%
		2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	0	0%	148.515.300	129.834.200	87.42%	12.58%
		3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 Orang	1 Orang	100%	3.500.000	255.000	8.29%	91.71%
		4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Orang	43 Orang	215%	32.621.280	32.552.000	99.79%	0.21%



		5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	0	0%	8.354.000	0	0%	100%
	4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	24.157.900	23.501.400	97.28%	2.72%
		1	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencanadisemuasektorsesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi danRekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 Kegiatan	13 Kegiatan	108.33%	24.157.900	23.501.400	97.28%	2.72%



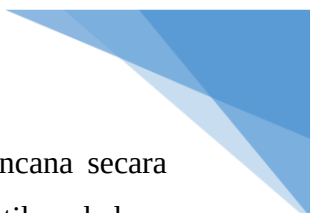
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat Kabupaten/Kota hanya memiliki 1 (satu) program yaitu Program Penanggulangan Bencana, dimana program ini merupakan satu satunya wadah dalam penganggaran yang mendukung Sasaran terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang 2021 – 2026 Misi ke lima “Mewujudkan Kota Moderen yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur” tujuan kedua “ Meningkatkan Ketahanan Daerah” dengan Sasaran “ Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana” sedangkan perangkat daerah yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut : “Meningkatnya Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas”.

Program Penanggulangan terdiri dari 4 (empat) kegiatan :

1. **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** : merupakan kegiatan yang memiliki peran penting dalam peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana. Penyebaran informasi melibatkan metode dan teknologi yang mempermudah dalam pendistribusian informasi terkait bencana yang ada di wilayahnya. Salah satu bentuk kegiatan pelayan informasi rawan bencana adalah adanya peta rawan bencana yang dimuat dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Magelang yang telah disusun pada tahun 2023. Secara keseluruhan kegiatan pelayan informasi rawan bencana merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak.

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang mendukung/ berkontribusi prioritas/parameter 1 yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan , prioritas/prioritas 2 yaitu : Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu , serta prioritas/parameter 3 yaitu : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik.

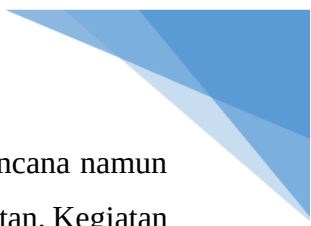
2. **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** : merupakan kegiatan upaya yang dirancang untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum, selama, dan setelah kejadian bencana. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat, hingga sektor swasta, dengan tujuan untuk membangun kesadaran, keterampilan, serta infrastruktur yang mendukung kesiapan dalam menghadapi potensi bencana. Pada tahap pencegahan, kegiatan difokuskan pada upaya mengurangi atau menghindari terjadinya bencana. Kegiatan kesiapsiagaan bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat dan instansi terkait agar dapat merespons bencana dengan cepat dan efektif yang mencakup pelatihan dan simulasi rutin mengenai prosedur evakuasi, pengenalan jalur-jalur evakuasi yang aman, serta pembekalan keterampilan dasar untuk penanganan bencana, seperti pertolongan pertama pada korban. Badan Penanggulangan



Bencana Daerah dan pihak terkait lainnya menyelenggarakan simulasi bencana secara berkala di sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua pihak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat. Pelayanan kesiapsiagaan juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menghadapi bencana melalui pengadaan peralatan evakuasi, posko darurat, tempat penampungan sementara, serta sistem komunikasi yang dapat digunakan selama dan pasca-bencana. Kesiapan sarana prasarana ini sangat penting untuk memastikan bahwa saat bencana terjadi, semua fasilitas yang diperlukan sudah tersedia dan berfungsi dengan baik. Selain itu, BPBD bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti kepolisian, TNI, dan lembaga kesehatan, untuk menyusun rencana kontinjensi dan SOP (Standard Operating Procedure) penanganan bencana yang jelas dan terkoordinasi. Keberhasilan kegiatan kesiapsiagaan sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antar lembaga ini, sehingga saat bencana terjadi, respons dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan juga melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pembentukan relawan yang siap membantu di saat-saat darurat melalui pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KALTANA). Masyarakat yang teredukasi tentang bahaya bencana dan cara-cara pencegahan akan lebih siap untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar mereka. Di samping itu, mereka juga bisa menjadi agen informasi yang menyebarkan pengetahuan mengenai keselamatan dan kesiapsiagaan bencana kepada orang lain. Secara keseluruhan, kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tidak hanya melibatkan tindakan teknis dan fisik, tetapi juga menciptakan budaya kesiapsiagaan di tingkat masyarakat. Dengan adanya pendidikan, latihan, dan kesiapan fasilitas yang memadai, diharapkan masyarakat dapat menghadapi ancaman bencana dengan lebih terorganisir, sehingga berdampak kerugian yang lebih minim.

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana merupakan kegiatan yang mendukung/berkontribusi pencapaian prioritas/parameter 1 yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, prioritas/parameter 2 yaitu Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, prioritas/parameter 3 yaitu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Prioritas/parameter 4 yaitu Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, prioritas/parameter 5 yaitu Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, prioritas/parameter 6 yaitu Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : merupakan serangkaian kegiatan kegiatan yang mengakomodir saat terjadinya bencana / pada saat kedaruratan. Kegiatan dimulai pada saat adanya laporan kejadian bencana, Tim Reaksi Cepat bergerak ke lokasi terdampak, melakukan assessment cepat untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang membutuhkan penanganan segera. Seluruh proses evakuasi di pantau oleh Posko Komando Penanggulangan Bencana yang bertindak sebagai pusat kendali operasional. Kegiatan ini



tidak hanya berfokus pada respon cepat dalam menindaklanjuti kejadian bencana namun juga pemberian bantuan logistik kepada korban terdampak pada saat kedaruratan. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menyelamatkan nyawa.

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mendukung pencapaian prioritas 2 yaitu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, prioritas/parameter 6 yaitu Perkuatam Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana,

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana : Merupakan upaya yang terstruktur dan terencana untuk membangun dan memperkuat kemampuan masyarakat, pemerintah serta Lembaga terkait dalam menghadapi bencana. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana merupakan kegiatan pertama dalam penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang mendasari semua tindakan penanggulangan bencana. Pemerintah, bersama dengan lembaga terkait, menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek penanggulangan bencana, seperti pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan rehabilitasi. Kebijakan ini juga mencakup penetapan tanggung jawab masing-masing pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, atau sektor swasta. Fokus utama dalam penataan sistem dasar penanggulangan bencana adalah penguatan kelembagaan, adanya peta risiko bencana sehingga tersedia data penduduk terpilah di daerah rawan bencana peningkatan sumber daya manusia aparatur penanggulangan bencana, tersedianya adata dan informasi kebencanaan, keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana.

Kegiatan Penataan system dasar penanggulangan bencana berkontribusi pencapaian prioritas seluruh prioritas

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan OPD yang masuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri atas 3 pelayan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Thun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

1. Pelayan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan kesispsiagaan terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Adapun Capain Kinerja SPM sub Urusan bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja SPM Sub – Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Kinerja
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	100%	100%	100%	100%
		A. Jumlah yang harus dilayani	100%	100%	100%	120 Orang
		B. Jumlah Mutu	100%	100%	100%	1 Dokumen KRB 50 Org WN yg tinggal di daerah rawan bencana 120 Orang yag mendapatka n sosialisasi (KIE) 1 Rambu evakuasi
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	100%	100%	100%	100%
		A. Jumlah yang harus dilayani	100%	100%	100%	445 Orang
		B. Jumlah Mutu	100%	100%	100%	4 Sarana prasarana Penanggula ngan Bencana 381 orang yang mendapatka n kapasistas peningkatan personil

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	100%	100%	100%	100%
---	--	---	------	------	------	------

Penanggulangan Bencana selain masuk sebagai salah satu Pelayanan Dasar, penanggulangan bencana juga merupakan bagian dari upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, karena bencana yang tidak tertangani dengan baik dapat merusak pembangunan. Adapun tujuan SDGs yang berfokus pada pengurangan risiko bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

No	Tujuan TPB	Kode Indikator TPB	Indikator TPB	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Tujuan 1 : Mengurangi Kemiskinan	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	0	0
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Tingkat kab/kota	1. Kajian Risiko Bencana 1 dok 2. Rencana Kontijensi Angin 1 dok 3. Rencana Kontijensi Longsor 1 dok	1. Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan 1 dok
2	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0
		11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDRB	25.04%	102.30%
3	Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	0	0

Sasaran perangkat daerah merupakan bagian dari sasaran daerah, yang berfokus sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing perangkat daerah. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran langsung dalam palaksanaan kebijakan dan program yang dirancang pemerintah daerah. Setiap perangkat daerah bertanggungjawab atas sasaran yang sesuai dan telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Adapun kontribusi sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang berkontribusi terhadap sasaran pemerintah Kota Magelang dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 8 Kontribusi Sasaran Perangkat Daerah terhadap Capaian sasaran Pemerintah Kota Magelang

No	Pemerintah Daerah				Perangkat Daerah			
	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Sasaran Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	47.40	48	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencnaaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	41	48

Visi Kota Magelang “ Maju Sehat dan Bahagia” dengan misi yang diturunkan dalam 5 misi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pendukung misi 5 “ Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrasrtuktur” dengan dua tujuan. Tujuan kedua “ Meningkatkan Ketahanan Daerah” dan sasaran pertama “ Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana’.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan sasaran yang selaras dengan sasaran daerah adalah : Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencnaaan yang Berkualitas. Target sasaran daerah sebesar 44.70 dan tercapai 48 atau sebesar 101.26%, sedangkan sasaran perangkat daerah, target 41 tercapai 48 atau sebesar 117.07%.

Program unggulan kepala daerah Kota Magelang dirancang untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup



masyarakat dan mewujudkan kota yang sehat, maju, dan bahagia. Setiap program unggulan telah dipilah dan disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, dengan harapan bahwa setiap OPD dapat memberikan kontribusi maksimal untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Salah satu program unggulan yang menjadi fokus adalah "**Rodanya Masbagya**", yang merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan, berbasis pada wilayah Rukun Tetangga (RT). Dalam program ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang berkontribusi langsung dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sesuai dengan **Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021** tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia, pemberdayaan masyarakat dimaksudkan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan yang dapat memperbaiki situasi dan kondisi mereka sendiri serta lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, BPBD Kota Magelang turut berperan dalam penguatan kapasitas masyarakat melalui program yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di tingkat RT.

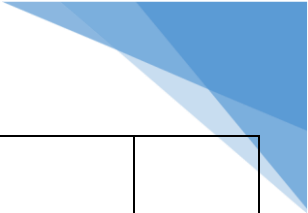
Lebih lanjut, **Pasal 12** dalam Peraturan Wali Kota tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT/RW mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah **penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya**. Program **Rodanya Masbagya** ini juga berfokus pada penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi bencana, sehingga mereka lebih siap dan tanggap menghadapi berbagai potensi ancaman yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Dengan demikian, BPBD Kota Magelang berperan penting dalam mendukung masyarakat agar lebih mandiri dan siap siaga dalam menghadapi bencana, serta dapat meningkatkan ketahanan sosial dan lingkungan di tingkat kelurahan dan RT.

Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Kota Magelang akan lebih terlibat secara aktif dalam pembangunan yang mencakup aspek kebencanaan, sekaligus mendukung tercapainya tujuan daerah yang sehat, maju, dan bahagia.

Adapun Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah pendukung Program unggulan tersebut terdiri dari 4 sub kegiatan yang tersebut tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3. 9 Kontribusi Program Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

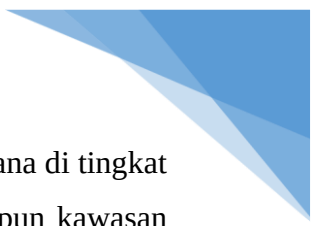
No	Program Unggulan Pemeritah Daerah	Perangkat Daerah					
		Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Realisasi
1	RODANYA MAS BAGYA Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat & Bahagia	Program Penanggulangan Bencana	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana		100%	100%	100%
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancamanbencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	120 Orang	120 Orang	100%
				Jumlah warga negarayang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan daruratbencana (per jenisancaman) Kabupaten/Kota	175 Orang	175 Orang	100 %
				Jumlah kawasan rawan bencana(per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang	2 Kawasan	2 Kawasan	100%



				memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana			
				Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	30 Orang	100%
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	100%

Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan maksud dari program unggulan kepala daerah dapat di lakukan dengan berbagai upaya, diantaranya melalui :

1. Sosialisasi Komunikasi , Informasi dan edukasi rawan bencana merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan cara – cara untuk menghadapi dan mengurangi dampaknya. Kegiatan ini lebih sering dilaksanakan secara tatap muka kepada masyarakat dan dilakukan ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
2. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana merupakan kegiatan latihan yang dilakukan untuk menguji kesiapsiagaan masyarakat, relawan serta aparat pemerintah dalam menghadapi berbagai situasi darurat yang terkait dengan bencana. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak tahu dan mampu bagaimanabertindak dengan cepat ketika terjadi bencana, kegiatan gladi, biasanya dilakukan di area yang rentan terhadap bencana, kegiatan ini dilakukan pada waktu tertentu yang bisa disesuaikan dengan jadwal latihan atau sebagai bagian dari peringatan hari kesiapsiagaan bencana nasional
3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsagaan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Fokus utama dari kegiatan ini adalah



untuk memperkuat sistem pencegahan, mitigasi, serta kesiapsiagaan bencana di tingkat kawasan atau wilayah tertentu, baik itu di tingkat kelurahan, desa, maupun kawasan rawan bencana lainnya, didalam kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membentuk kelurahan tangguh bencana di masing – masing kelurahan dimana sampai saat ini sudah terbentuk 8 kelurahan tangguh bencana.

4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota merupakan rangkaian peningkatan kemampuan tim reaksi cepat untuk merespons secara cepat dan efektif dalam situasi bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam. Pengembangan kapasitas TRC sangat penting untuk memastikan bahwa tim ini dapat memberikan bantuan dengan cepat, tepat, dan efisien ketika terjadi bencana di suatu wilayah.
5. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, instansi pemerintah, serta relawan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko bencana. Kegiatan ini sangat penting untuk mengurangi dampak bencana yang dapat merusak kehidupan dan aset masyarakat serta mempercepat pemulihan pasca-bencana. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkala, baik dalam bentuk sesi pelatihan, maupun simulasi. Pelatihan ini diikuti oleh berbagai pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam penanggulangan bencana.

Kontribusi langsung sub kegiatan yang mendukung program unggulan RODANYA MASBAGYA adalah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dimana pada sub kegiatan terdapat usulan kegiatan pelatihan kebencanaan melalui Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dari Masyarakat kelurahan Magersari sebanyak 1 orang dan kelurahan Kemirirejo sebanyak 4 orang dengan indeks biaya kegiatan per orang Rp. 250.000,-, sehingga secara keseluruhan anggaran yang mendukung secara langsung Program Unggulan RODANYA MASBAGYA sebesar Rp. 1.250.000,-

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang merupakan proses penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Anggaran ini di alokasikan untuk berbagai kegiatan mulai pencegahan, kesiapsagaan kedaruratan dan pascabencana, selain untuk kegiatan dalam rang melaksanakan tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana di daerah, anggaran ini juga digunakan dalam rangka melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

Adapun realisasi anggaran yang langsung mendukung sasaran perangkat daerah dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimaal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	41	48	117.07%	725.165.392	689.397.874	95.07%	4.93%

Dengan melihat pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, anggaran yang disediakan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp. 725.165.392,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 689.397.874 atau sebesar 95.07%, atas anggaran tersebut sasaran yang menjadi target terealisasi sebesar 48 dari target sebesar 41 atau sebesar 117.07 sesuai yang telah diperjanjian oleh perangkat daerah.

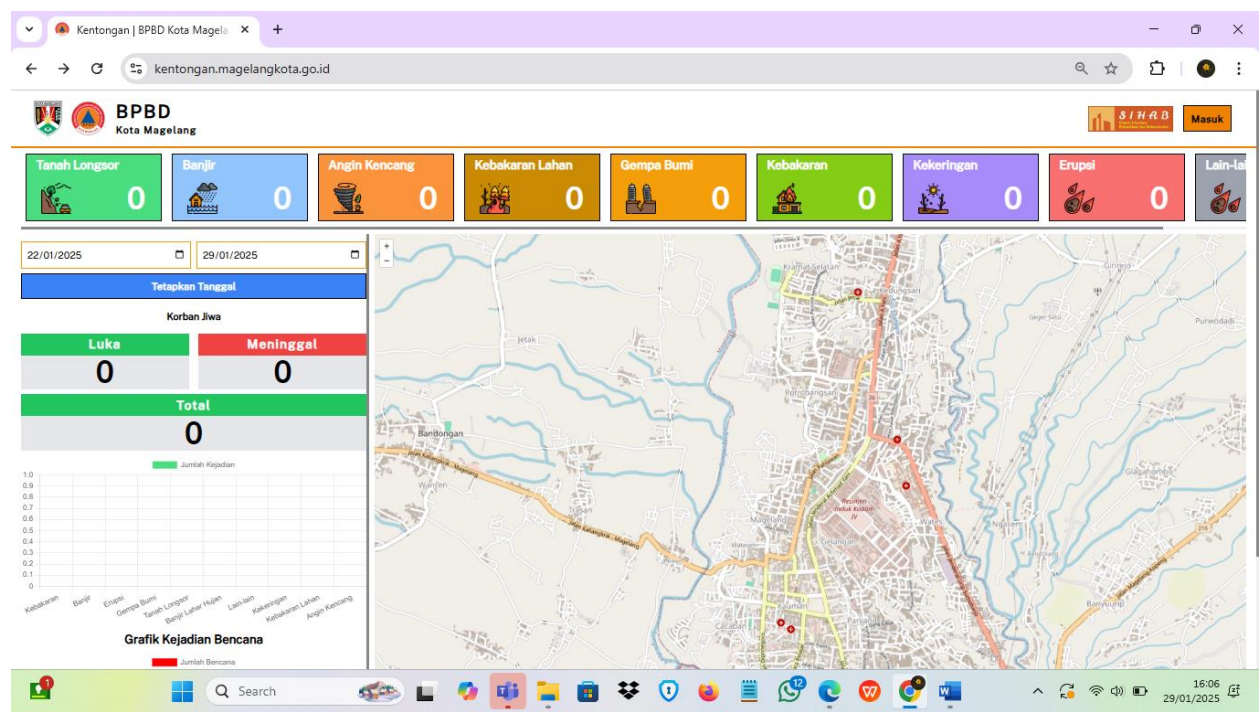
3.4 Inovasi

Inovasi merupakan salah satu upaya dalam mencapai target kinerja OPD selain atas dukungan anggaran, Dengan berdirinya BPBD Kota Magelang yang terhitung masih baru, perlu adanya dukungan anggaran yang cukup, namun demikian bahwa di dalam proses penganggaran terdapat banyak kendala , dan salah satunya kemampuan keuangan daerah, dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut sangat perlu adanya inovasi bagi BPBD Kota Magelang guna mempercepat capaian targetnya, Inovasi yang telah dikembangkan :

1. Aplikasi Sistem Kebencanaan “KENTONGAN” <https://kentongan.magelangkota.go.id/> adalah. aplikasi/sistem kedaruratan dan pertolongan merupakan sistem informasi kebencanaan Kota Magelang. Pengelolaan informasi menjadi suatu hal yang penting. Data tentang kebencanaan juga menjadi salah satu point penting dalam pengambilan kebijakan baik di organisasi BPBD maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten. BPBD Kota Magelang berusaha untuk mengelola data tentang kebencanaan itu melalui suatu aplikasi sistem informasi kebencanaan yang bernama Kentongan. Informasi yang dihimpun memuat informasi manajemen penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. Informasi pada saat pra bencana meliputi informasi pemetaan lokasi rawan bencana, yang ditampilkan dalam peta rawan bencana, serta rencana kedepannya memuat informasi tentang jalur evakuasi, informasi

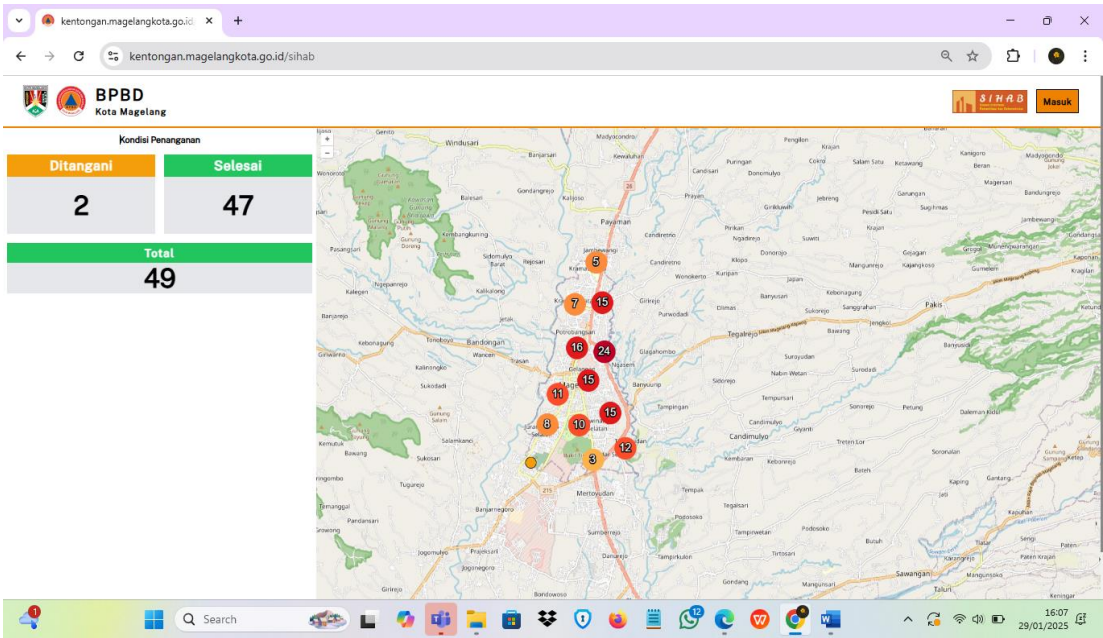
tentang proyeksi tempat kumpul atau tempat evakuasi sementara ketika terjadi bencana. Informasi yang dihimpun saat tanggap darurat yaitu informasi tentang kaji cepat kejadian bencana, informasi tentang OPD yang berperan serta dalam penanggulangan bencana serta informasi tentang penanganan kejadian bencana. Bersama dengan tim jitupasna informasi tentang kerugian akibat bencana juga dituangkan dalam aplikasi ini. Untuk informasi yang ditampilkan pada saat pascabencana yaitu informasi tentang kerugian akibat bencana, informasi progress penanganan kejadian bencana setelah masa tanggap darurat selesai. Informasi tentang kejadian bencana ini dapat diakses oleh publik sehingga diharapkan akan menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan sebagai langkah dari pengurangan resiko bencana. Informasi-informasi yang terhimpun tersebut akan dapat mengurangi dampak bencana.

Gambar 3. 1 Aplikasi Kentongan

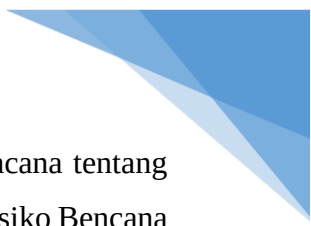


2. SIHAB merupakan aplikasi yang berbasis Web, para stakeholder dapat melihat informasi penanganan pasca bencana sesuai titik koordinat kejadian dengan tanda berwarna hijau untuk yang telah selesai di tangani dan berwarna kuning yang belum selesai tertangani atau tidak dapat ditangani dilengkapi kendala/ hambatan dalam penanganannya. Aplikasi telah dicantumkan dalam Website BPBD Kota Magelang dan dapat diakses melalui alamat <https://bpbk.magelangkota.go.id/> yang dilengkapi fasilitas fitur saran dan masukan, sehingga masyarakat atau stakeholder dapat menyampaikan permasalahan, saran masukan melalui fasilitas dimaksud dengan nama disamarkan/ anonym.

Gambar 3. 2 Aplikasi Berbasis Web SIHAB



3. **SOSIS BLUTUK** : dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan KIE daerah rawan bencana Kota Magelang maka BPBD Kota Magelang menerapkan sistem yang disebut SOSIS BLUTUK (Sosialisasi Blusukan Turut Kelurahan). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai elemen baik para tenaga ahli sebagai narasumber yang berkompeten di bidangnya serta warga masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana. Rencana kegiatan akan dilaksanakan pada 17 Kelurahan di Kota Magelang secara bertahap sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana salah satunya pemerintah wajib melaksanakan pelayanan dasar bidang bencana melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dengan sasaran seluruh warga negara pada daerah rawan bencana khususnya yang tinggal di Wilayah Kota Magelang.
- Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KIE yang sebelumnya dilaksanakan secara terpusat dengan kehadiran peserta yang kurang tepat sasaran sebagaimana ketentuan, dengan adanya SOSIS BLUTUK maka pelaksanaan kegiatan KIE dilakukan dengan metode mendatangi lokasi rawan bencana sesuai dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Magelang 2023-2027. Pada tahun 2023 dilaksanakan dengan pendekatan lokasi kegiatan pada Tingkat kelurahan, kedepan akan dilaksanakan dengan pendekatan pada lokasi warga Masyarakat yang tinggal pada wilayah rawan bencana baik pada Tingkat RT maupun RW. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi



pada masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah rawan bencana tentang potensi resiko bencana pada lokasi tersebut sesuai hasil Kajian Resiko Bencana serta informasi dan edukasi tentang bagaimana mitigasinya serta kesiapsiagaan masyarakatnya.

3.4 Lintas Sektoral

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut undang – uadang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 20 huruf (b) pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terarah, terpadu, dan menyeluruh, fungsi koordinasi tersebut meliputi :

1. Tidak ada bencana :
 - Perencanaan Penanggulangan Bencana
 - Pengurangan Risiko Bencana
 - Pencegahan
 - Pamaduan dalam Rencana Pembangunan
 - Pensyaratan analisis risiko bencana
 - Penegakan rencana tata ruang
 - Pendidikan dan pelatihan
 - Pensyaratan standar teknis penanggulangan Bencana
2. Kesiapsiagaan :
 - Mitigasi
 - Kesiapan
 - Peringatan dini
3. Pada saat tanggap darurat :
 - Kaji cepat
 - Penetapan status darurat
 - Pemenuhan kebutuhan dasar
 - Perlindungan kelompok rentan
 - Pemulihan sarana kunci
4. Pemulihan :
 - Rehabilitasi &
 - Rekonstruksi

Dari seluruh kegiatan dalam rangka perkoordinasian, kegiatan pengurangan risiko bencana adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan output yang berperan sangat penting dalam upaya mitigasi dan pengelolaan bencana, Fungsi dokumen ini adalah untuk memetakan, merencanakan langkah – langkah yang di ambil untuk mengurangi dapmat dan risiko bencana yang terjadi. Berikut adalah tabel inventarisasi kegiatan lintas sektor hasil dari pengkoordinasian lintas sektar dalam rangka pengurangan risiko bencana daerah :

Tabel 3. 11 Inventarisasi Lintas Sektor Perangkat Daerah

No	Kegiatan Lintas sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Output	Kelompok Sasaran	
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	1. Kepala Daerah 2. DPRD 3. Akademisi 4. Bagian Hukum 5. Biro Hukum Prov Jateng 6. Kemenkumham Jateng 7. OPD, lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Relawan, Tokoh Masyarakat, Media	Penetapan Perda Pembahasan Rancangan Perda Penyusunan Naskah Akademis dan draft Perda Fasilitasi Pembahasan dan Legal Drafting Verifikasi dan pendalaman legal drafting Verifikasi dan pendalaman legal drafting FGD pengumpulan muatan lokal draft Raperda	Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pemerintah, Masyarakat dan kelompok swasta	1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana 2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana serana terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh 3. Menghargasi karakter daerah dan budaya masyarakat 4. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta 5. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kederawanan; 6. Menciptakan kedamaian dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
2	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	1. BNPB 2. BPBD Prov Jateng 3. Akademisi 4. DLH, DKK, Satpol, Dishub, Dinsos, DPUPR, Disperkim, Bag Kesra, Kecamatan 5. Kelurahan 6. Lembaga Kemasyarakatan, Media, Organisasi Relawan, Tokoh Masyarakat, Pusat Study kebencanaan 7. Bagian Hukum	Asistensi/ pendampingan Asistensi/ pendampingan Konsultan penyusun Tim Teknis Penyusunan dok KRB Pendamping Survei Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) PB FGD Potensi Kebencanaan Fasilitasi Penyusunan Perwal legalisasi KRB	Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Magelang	Pemerintah, Masyarakat dan kelompok swasta	1. Pada tatanan pemerintahan , hasil pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana, yang nantinya merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan 2. Pada tatanan mitra pemerintah, hasil pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun inervensi teknis langsung ke komunitas terpapar

						untuk mengurangi risiko bencana. 3. Pada tatanan masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi prakttis dalam rangka keispsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal dsb
3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1. BNPB 2. BPBD Prov jateng 3. Akademisi 4. DLH, DKK, Satpol, Dishub, Dinsos, DPUPR, Disperkim, Bag Kesra, Kecamatan 5. Kelurahan 6. Lembaga Kemasyarakatan, Media, Organisasi Relawan, Tokoh Masyarakat, Pusat Study kebencanaan 7. Bagian Hukum	Asistensi/ pendampingan Asistensi/ pendampingan Konsultan penyusun Tim Teknis Penyusunan dok KRB Pendamping Survei Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) PB FGD Potensi Kebencanaan Fasilitasi Penyusunan Perwal legalisasi KRB	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2019-2023	Pemerintah, Masyarakat dan kelompok swasta	1. Memberikan panduan dan kerangka kerja kepada semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di Kota Magelang, agar kegiatan penanggulangan bencana dapat terencana, terpadu, terkoordinasi dan sinergi 2. Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dan berbagai potensi bencana yang terdapat di Kota Magelang 3. Menyusun dan merencanakan tindakan-tindakan penanggulangan bencana yang perlu menjadi perhatian, termasuk prioritas program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan 4. Membangun kesadaran, pemahaman, kesatuan pola pikir, dan integrasi tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana di Kota Magelang
4	Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi			Rencana Kontijensi Angin, Longsor dan Karhutla	Pemerintah, Masyarakat dan kelompok swasta	Sebagai landasan strategi, operasional dan pedoman dalam penanganan darurat bencana dan sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang

						terlibat dalam penanggulangan bencana di wilaah Kota Magelang
--	--	--	--	--	--	---

1. Penyusunan Regulasi penanggulangan bencana mempunyai maksud agar penyelenggaraan penanggulangan bencana memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.
2. Dokumen Kajian Risiko Bencana memuat : Peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas
3. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen yang berisi perencanaan dan langkah – langkah yang diambil dalam menghadapi dan mengelola bencana di suatu wilayah, dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam rangka penanggulangan bencana dengan tujuan untuk meminimalkan dampak bencana yang ditimbulkan.
4. Dokumen Rencana Kontijensi, merupakan dokumen yang sangat penting dalam manajemen penanggulangan bencana, dengan adanya rencana yang matang dan terstruktur, respon terhadap bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Rencana ini juga memastikan koordinasi berbagai pihak meminimalkan dampak bencana yang bersifat dinamis dan perlu evaluasi dan pemutakhiran agar selalu relevan dalam situasi dan kondisi yang ada.

BAB IV
PENUTUP

bab IV berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah –
Langkah
Perbaikan
Kinerja*

Keberhasilan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2024 tidak lepas dari adanya kerjasama , komitmen yang dapat meningkatkan pencapaian kinerja.

4.1 Kesimpulan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, dapat maka penyajian Laporan kinerja Badan Panangggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dapat disimpulkan:

1. Capaian Kinerja Program tercapai 100 % dengan indikator Presentase Layanan Penanggulangan Bencana dengan definisi operasionalnya , Jumlah kejadian bencana yang tertangani di bagi jumlah kejadian bencana di kali 100% = 56 kejadian bencana dibagi 56 di kali 100% = 100%
2. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah “ Meningkatkan Kapasitas Daerah yang Optomal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas “ yang berkontribusi terhadap sasaran Pemerintah Kota Magelang “Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah tercapai 48 dari target 47.40 sehingga capaiannya sebesar 101.27% yang terdiri dari tujuh paramater :
 - Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan tercapai : 0.79
 - Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu tercapai : 0.70
 - Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik tercapai : 0.63
 - Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana tercapai : 0.75
 - Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana tercapai : 0.44
 - Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan darurat Bencana tercapai : 0.34 dan
 - Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana tercapai : 0.36

4.2 Langkah-langkah Perbaikan Kinerja

Selanjutnya langkah – langkah kedepan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sangat penting untuk memastikan bahwa segala upaya yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diinginkan tercapai. Berikut langkah – langkah dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tatget tersebut sebagai berikut : Langkah- Langkah perbaikan kinerja

1. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana
2. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana
3. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (Pemutakhiran dari dokumen yang telah ada th 2019 – 2023 , yang disusun oleh BAPPEDA Kota Magelang)

4. Legalisasi atas dokumen pengurangan risiko bencana yang terdiri Dokumen Kajian Risiko Bencana, dan 3 Dokumen Rencana Kontijensi , Banjir Longsor dan Karhutla
5. Penyusunan kajian kebutuhan Logistik dan Peralatan dan legalisasinya
6. Penyusunan Keputusan Wali Kota Magelang tentang SOP
7. Penyusunan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Pemberian Bantuan Darurat Bencana sebagai dasar penganggaran bantuan yang jelas untuk korban/terdampak bencana sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari PMI dan BAZNAS Kota Magelang dan
8. Integrasi penyebaran informasi kebencanaan daerah dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPBD Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain untuk menentukan kebijakan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih baik dan akuntabel dan meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana di Kota Magelang.

Magelang, 28 Februari 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Magelang



MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd

NIP. 19651203 198902 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MACHBUB YANI ARFIAN
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ
Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2024



Pihak Kedua,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Pihak Pertama,

MACHBUB YANI ARFIAN

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Kapasitas Daerah	47.40

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.723.201.836,-
2. Program Penanggulangan Bencana	904.806.390,-

Magelang, Januari 2024



Pihak Kedua

MUHAMMAD NUR AZIZ

Pihak Pertama

MACHBUB YANI ARFIAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2024**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MACHBUB YANI ARFIAN
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ
Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 15 Mei 2024



Pihak Kedua,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Pihak Pertama,

MACHBUB YANI ARFIAN

LAMPIRAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	98.25
2	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	41

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.723.201.836,-
2. Program Penanggulangan Bencana	904.806.390,-

Magelang, 15 Mei 2024



Pihak Kedua
MUHAMMAD NUR AZIZ

Pihak Pertama

MACHBUB YANI ARFIAN



PEMERINTAH KOTA MAGELANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363646
Fax. (0293) 364910 Magelang 6101
Website : inspektorat.magelangkota.go.id, Email : inspektoratmgkota@yahoo.com

Magelang, 29 Agustus 2024

Nomor : 700.1.2.1/016.B.EV/600
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Yth. Kepala BPBD Kota Magelang
di

MAGELANG

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 700.1.2/008.Ev/600 Tanggal 24 Juni 2024.

b. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

c. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi internal yang mencakup evaluasi atas akuntabilitas kinerja dan evaluasi atas hasil program yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome*.

Dengan bobot penilaian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis 10%, meliputi: - Pemenuhan Renstra (2%); - Kualitas Renstra (3%); dan - Implementasi Renstra (5%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: - Pemenuhan RKT (4%); - Kualitas RKT (6%); dan - Implementasi RKT (10%).

4. Legalisasi atas dokumen pengurangan risiko bencana yang terdiri Dokumen Kajian Risiko Bencana, dan 3 Dokumen Rencana Kontijensi , Banjir Longsor dan Karhutla
5. Penyusunan kajian kebutuhan Logistik dan Peralatan dan legalisasinya
6. Penyusunan Keputusan Wali Kota Magelang tentang SOP
7. Penyusunan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Pemberian Bantuan Darurat Bencana sebagai dasar penganggaran bantuan yang jelas untuk korban/terdampak bencana sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari PMI dan BAZNAS Kota Magelang dan
8. Integrasi penyebaran informasi kebencanaan daerah dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPBD Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain untuk menentukan kebijakan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih baik dan akuntabel dan meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana di Kota Magelang.

Magelang, 28 Februari 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Magelang



MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd

NIP. 19651203 198902 1 005

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran 5% b. Kualitas pengukuran 7,5% c. Implementasi pengukuran 12,5%
3.	Pelaporan Kinerja	10%	a. Pemenuhan pelaporan 2% b. Penyajian informasi kinerja 3% c. Pemanfaatan informasi kinerja 5%
4.	Evaluasi Internal	15%	a. Pemenuhan evaluasi 3% b. Kualitas evaluasi 4,5% c. Pemanfaatan hasil evaluasi 7,5%
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) 5% b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) 15%
Total		100%	

d. Metodologi Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan adalah kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) serta kendala yang ada. Evaluasi AKIP dilakukan dengan cara menilai setiap kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan profesional *judgement* dari para evaluator dan pengendali teknis (supervisor) berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik.

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan, sebagai berikut:

- 1) Telah menyusun IKI seluruh pegawai tahun 2022;
- 2) Pengumpulan data kinerja, pengukuran dan pemantauan kinerja telah menggunakan aplikasi SMART Magelang;

- 3) Telah menyusun laporan capaian kinerja per triwulanan yang didukung dengan sumber data kinerja yang relevan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja;
- 4) Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi yang dilengkapi dengan faktor penghambatan dan rekomendasi perbaikan kedepannya.

2. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk perangkat daerah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas (atau yang setara).
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 bidang/sekretariat. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III (atau yang setara).

Predikat	Interpretasi
B (Nilai > 60 – 70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 bidang/sekretariat. Namun masih perlu adanya sedikit perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada bidang/sekretariat.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam Implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang memperoleh nilai sebesar 83,31 (A) Memuaskan, (sebagaimana *print out* kertas kerja terlampir) yang artinya bahwa terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas (atau yang setara).

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,10
2.	Pengukuran Kinerja	25	21,64
3.	Pelaporan Kinerja	10	9,06
4.	Evaluasi Internal	15	11,75
5.	Capaian Kinerja		
	a. <i>Output</i>	5	4,50
	b. <i>Outcome</i>	15	11,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,31
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas perencanaan kinerja diketahui bahwa:

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, **namun Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Tahun 2021-2026 belum selaras dengan IKU dan PK Tahun 2023.**
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang juga telah menyusun Peta Strategis Kinerja (Pohon Kinerja). Pohon Kinerja telah dilengkapi dengan kondisi, indikator, target jangka menengah dan *cross cutting issues*.
- 3) PK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang telah menyajikan IKU dan telah menjanjikan kondisi yang seharusnya diwujudkan.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengukuran kinerja diketahui bahwa:

- 1) Target kinerja dalam Renstra, IKU, PK dan *cross cutting issues* telah dimonitor pencapaiannya secara berkala serta dievaluasi melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi serta ditindaklanjuti. Monitoring dan evaluasi rencana aksi dilakukan setiap tiga bulan (triwulan).
- 2) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi yaitu Smart Magelang yang dapat diakses melalui <https://smart.magelangkota.go.id/>. Pengukuran dilakukan setiap tiga bulan (triwulan).

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan kinerja diketahui bahwa:

- 1) LKjIP telah disusun dan telah direviu oleh APIP.
- 2) LKjIP telah menyajikan:
 - a) Seluruh capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK;
 - b) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023;
 - c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra;
 - d) Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan serta upaya/solusi yang telah dilakukan;
 - e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.
 - g) *Cascading* kinerja;
 - h) Instrumen pendukung capaian kinerja;
 - i) Inovasi;
 - j) Faktor pendukung keberhasilan;
 - k) Langkah-langkah perbaikan ke depan; dan
 - l) Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022.

- 3) Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan untuk perbaikan perencanaan, juga untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan.

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Berdasarkan hasil evaluasi atas evaluasi internal diketahui bahwa:

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang sudah memiliki pedoman atau SOP untuk mengetahui perkembangan penguatan akuntabilitas kinerja.
- 2) Evaluasi atas capaian kinerja IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Hasil evaluasi berupa rekomendasi telah disampaikan/dikomunikasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sudah ditindaklanjuti, **namun evaluasi atas capaian kinerja IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan belum dilaksanakan tepat waktu.**

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja diketahui bahwa:

- 1) Target kinerja dapat dicapai; dan
- 2) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian hasil evaluasi serta dalam rangka mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra dengan IKU dan PK.
- b. Tepat waktu dalam melaksanakan evaluasi capaian kinerja IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, namun masih perlu upaya peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai rekomendasi diatas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG



LARSITA, S.E., M.Sc., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 008

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1. Wali Kota Magelang;
2. Wakil Wali Kota Magelang;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Magelang.

KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BPBD Kota Magelang

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	83,68%	25,10
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	76,04%	7,60
a.	PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH TELAH TERSEDIA (2%)	2,00	75,00%	1,50
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan/indikator (dapat diidentifikasi ukuran keberhasilannya).		C	0,50
4	Tujuan/Hasil Program telah disertai target keberhasilan (dapat diidentifikasi target keberhasilannya)		C	0,50
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		C	0,50
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		C	0,50
8	Renstra telah menyajikan IKU		C	0,50
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
10	Pohon Kinerja (Peta Strategi Kinerja) telah disusun		Y	1,00
b.	KUALITAS RENSTRA (3%) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART dan Cukup serta memperhatikan kinerja Bidang/sector lain (Crosscutting)	3,00	88,89%	2,67
11	Tujuan/Hasil program (pada Renstra dan Pohon Kinerja) telah berorientasi hasil		A	1,00
12	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil Program (pada Renstra dan Pohon Kinerja) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
13	Pohon Kinerja telah dilengkapi dengan Kondisi, Indikator dan Target Jangka Menengah		A	1,00
14	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
15	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
16	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75
17	Program/kegiatan (inisiatif dalam Pohon Kinerja) merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75
18	Dokumen Renstra (Pohon Kinerja) telah selaras dengan Dokumen RPJMN/RPJMD/Dokumen Renstra atasannya		B	0,75
19	Pohon Kinerja telah mengidentifikasi kondisi terukur yang harus diwujudkan bersama bidang/sector lain (<i>cross-cutting issues</i>)		B	0,75
c.	PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) RENSTRA (5%) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	5,00	68,75%	3,44
20	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan		B	0,75
21	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		C	0,50
22	Kondisi terukur yang harus diwujudkan bersama bidang/sector lain (<i>cross-cutting issues</i>) telah diukur dan ditindaklanjuti		B	0,75
23	Pohon Kinerja dijadikan acuan mereviu dan menyempurnakan struktur organisasi		B	0,75

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	87,50%	17,50
a.	PEMENUHAN (KEBERADAAN) PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) atau SKP telah disusun		A	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
4	PK atau SKP telah dipublikasikan		A	1,00
5	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) Dokumen Perencanaan kinerja tahunan telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART serta memperhatikan kinerja Bidang/sector lain (Crosscutting)	6,00	91,67%	5,50
6	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
7	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
9	Kegiatan relevan sebagai cara untuk mencapai sasaran		B	0,75
10	Dokumen PK dan SKP telah selaras dengan Renstra		C	0,50
11	Dokumen PK dan SKP telah selaras dengan Pohon Kinerja		A	1,00
12	Dokumen PK dan SKP telah menjanjikan kondisi yang seharusnya diwujudkan (bukan sekedar memuat kegiatan/subkegiatan yang akan dilakukan sesuai tugas fungsi)		A	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		A	1,00
c.	PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	80,00%	8,00
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		B	0,75
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV (atau yang disetarakan) dan individu		A	1,00
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	86,56%	21,64
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	100,00%	5,00
1	Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja sampai dengan individu sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
5	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
II.	KUALITAS PENGUKURAN (7,5%) Pengukuran Kinerja telah menjadi Kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berkelanjutan	7,50	96,88%	7,27
6	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik (Measureable dan Relevan)		A	1,00
7	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00
8	IKU bawahan telah selaras dengan IKU atasan (Indikator Kinerja Individu selaras dengan IKU entitas atasnya)		A	1,00
9	Ukuran (Indikator) kinerja bawahan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
10	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00
11	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1,00
12	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
13	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,75
III.	PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) PENGUKURAN (12,5%)	12,50	75,00%	9,38
14	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75
15	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,75
16	Hasil pengukuran (capaian) kinerja pegawai telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		B	0,75
17	Hasil pengukuran (capaian) kinerja organisasi telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar) alokasi anggaran		B	0,75
18	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,75
C. PELAPORAN KINERJA (10%)		10,00	90,63%	9,06
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (2%)	2,00	100,00%	2,00
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah dipublikasikan		Y	1,00
4	Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP		Y	1,00
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (3%) Lap Kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan /kegagalan Kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	3,00	100,00%	3,00
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		A	1,00
7	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00
8	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00
9	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A	1,00
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		A	1,00
11	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1,00
12	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		A	1,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
III.	PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) INFORMASI KINERJA (5%)	5,00	81,25%	4,06
13	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75
16	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75
	D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (15%)	15,00	78,33%	11,75
I.	PEMENUHAN EVALUASI (3%)	3,00	91,67%	2,75
1	Terdapat pedoman atau SOP atau "guidance" tentang bagaimana mengetahui perkembangan penguatan akuntabilitas kinerja		Y	1,00
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00
3	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00
4	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,75
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja (entitas dibawah OPD) telah dilakukan		Y	1,00
6	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75
II.	KUALITAS EVALUASI (4,5%) Evaluasi Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang Memadai	4,50	75,00%	3,38
7	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> menggambarkan <u>akuntabilitas kinerja</u> yang dievaluasi		B	0,75
8	Evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
9	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75
10	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
11	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
12	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75
13	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75
14	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,75
III.	PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) EVALUASI (7,5%)	7,50	75,00%	5,63
15	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan		B	0,75
16	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja		B	0,75
17	Hasil evaluasi <u>program</u> telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang		B	0,75
18	Hasil evaluasi <u>program</u> telah dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75
19	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah dimanfaatkan untuk perbaikan langkah selanjutnya		B	0,75
	E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	20,00	78,75%	15,75

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
I.	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)	5,00	90,00%	4,50
1	Target dapat dicapai		A	2,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A	2,00
II.	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (15%)	15,00	75,00%	11,25
4	Target dapat dicapai			4,38
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,88
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	83,31%	83,31

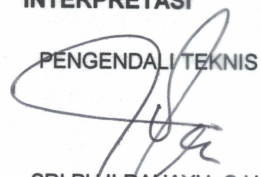
**NILAI SAKIP OPD
PREDIKAT
INTERPRETASI**

83,31

A

MEMUASKAN

PENGENDALI TEKNIS



SRI PUJI RAHAYU, S.H.
NIP. 19660717 198603 2 012

KETUA TIM



SUJARWO, S.E.
NIP. 19661230 199503 1 002

EVALUATOR



MAULINA PUSPITA RINI, S.P., M.M.
NIP. 19760313 200312 2 008

WAKIL PENANGGUNG JAWAB



TUTIK DAMAYANTI, S.E.
NIP. 19710403 199803 2 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN P1 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG
NO.
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR UTAMA BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2026

KINERJA UTAMA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/KETERANGAN		nilai kriteria
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Jumlah Tercapainya Prioritas Penanggulangan Bencana	Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	belum ada	0	
				sudah ada	1	
				sudah ada dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan	2	
			Pembentukan BPBD	belum ada	0	
				belum ada dalam proses pembentukan	1	
			Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	sudah ada	2	
				belum ada	0	
				sudah ada dan belum berperan aktif	1	
				sudah ada dan sudah berperan aktif	2	
			Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan	belum ada	0	
				sudah ada SOP tetapi belum terintegrasi	1	
				dengan sistem nasional		
			Kebijakan Daerah tentang PRB	sudah ada SOP serta sudah terintegrasi dengan sistem nasional	2	
				belum memiliki dokumen RP3	0	
				sudah memiliki tetapi belum ditetapkan dalam regulasi daerah	1	
Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB				sudah memiliki dan ditetapkan dalam regulasi daerah	2	
				belum mempertimbangkan	0	
				sudah mempertimbangkan pada sebagian dokumen taru (RTRW/RDTR/RTBL)	1	
				sudah mempertimbangkan pada semua dokumen taru (RTRW/RDTR/RTBL)	2	
				belum ada	0	
Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah				ada belum sesuai (aturan pusat)	1	
				ada sudah sesuai dan terpenuhi sumberdaya BPBD (saroras dan SDM)	2	
			Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana	belum ada	0	
				ada tetapi belum legal formal atau berperan aktif	1	
				ada sudah legal dan berperan aktif	2	
Komitmen DPRD terhadap PRB				belum terlibat	0	
				terlibat belum optimal (tahap pembahasan anggaran dan pengawasan)	1	

			Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	sudah ada pusdalops yang efektif menjalankan fungsi Belum ada sarana dan prasarana sistem pendataan bencana Suda ada sarana dan prasarana (termasuk format pendataan standar, dan system) yang belum terintegrasi dengan nasional Sudah ada sarana dan prasarana (termasuk format pendataan standar, dan system) yang terintegrasi dengan nasional Belum ada peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan peralatan PB Sudah ada peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan peralatan PB tetapi belum diujicoba telah dilakukan uji coba penggunaan peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapangan)	2 0 1 2 0 1 0 1	
			Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	Belum ada Ada tetapi belum rutin	0 1	
			Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan	ada dan sudah secara bertahap berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem) belum dilakukan sudah dilakukan belum berdasarkan dokumen rencana kontijensi, dll sudah dilakukan sudah berdasarkan dokumen rencana kontijensi, dll belum dilakukan	2 0 1 2 0	
			Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	sudah dilakukan belum memenuhi kebutuhan sudah dilakukan dan memenuhi kebutuhan belum ada tempat penyimpanan sudah ada tempat penyimpanan tetapi belum memenuhi standar sudah ada tempat penyimpanan serta memenuhi standar Belum ada	1 2 0 1 2 0	
			Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	ada dan sudah didukung SD memadai Ada dan sudah didukung SD yang memadai	1 2	
			Penyimpanan/pergudangan Logistik PB			
			Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik			

		Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	belum ada lembaga yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana ada lembaga yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana tetapi belum memiliki mekanisme dan prosedur penyediaan ada lembaga yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana dan sudah memiliki mekanisme dan prosedur penediaan belum ada lembaga yang bertanggungjawab pemenuhan pangan untuk darurat bencana	0	
		Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	ada lembaga yang bertanggungjawab menyediakan pangan untuk kebutuhan darurat bencana tetapi belum memiliki skenario dan strategi pemenuhnya ada lembaga yang bertanggungjawab menyediakan pangan untuk kebutuhan darurat bencana serta sudah memiliki skenario dan strategi pemenuhnya	2	
		Penataan ruang berbasis PRB	Belum ada integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam penataan ruang sudah ada integrasi tetapi belum optimal (pentuan program kerja PRB belum melihat struktur dan pola ruang dalam dokren)	0	
		Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	sudah ada integrasi serta dokumen rencana tata ruang (struktur dan pola ruang menjadi dasar penentuan program kerja PRB) belum ada lembaga menangani informasi penataan ruang	2	
		Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	sudah ada lembaga yg menangani informasi penataan ruang dan informasi juga sudah disampaikan melalui berbagai media masyarakat sudah memanfaatkan informasi penataan ruang untuk melakukan penguangan risiko bencana belum ada	1	
		Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana	sudah ada tapi belum memenuhi target 75% dari sekolah yang ada sudah ada dan sudah belum memenuhi target 75% dari sekolah yang ada belum ada	2	
				0	

			sudah ada tetapi belum memenuhi keseluruhan 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanganan bencana	1
		Desa Tangguh Bencana	sudah semua memenuhi keseluruhan 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penanganan bencana	2
	Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir		ada belum memenuhi target	0
			ada sudah memenuhi target	1
			belum ada	2
			ada belum memenuhi target	0
			ada sudah memenuhi target	1
			ada sudah memenuhi target	2
	Perlindungan daerah tangkapan air		belum ada kebijakan	0
			ada kebijakan dan langkah perlindungan	1
			ada kolaborasi perlindungan dengan pihak lain	2
	Restorasi Sungai		ada kolaborasi perlindungan dengan pihak lain	2
	Penguatan Lereng		belum ada kebijakan	0
			ada kebijakan dan tindakan penguatan	1
			ada kolaborasi penguatan dengan pihak lain	2
	Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana kebakaran lahan dan hutan		belum ada kebijakan	0
	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan		ada kebijakan dan tindakan perlindungan	1
			ada kolaborasi perlindungan dengan pihak lain	2
	Pemertan berkalahulu sungai		belum ada kebijakan	0
	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi		ada kebijakan	1
			ada tindakan pengawasan bangunan gedung	2
	Tanaman dan atau bangunan penahan gelombang tsunami		belum ada	0
	Revitalisasi tanggul embung waduk dan taman kota		ada sesuai target	1

				Restorasi lahan gambut Konservasi vegetatif DAS rawan longsor Rencana Kontijensi Gempabumi	ada belum memenuhi target	2	
				Rencana Kontijensi Tsunami Rencana Kontijensi Tsunami Rencana Evakuasi Bencana Tsunami Rencana Kontijensi Banjir	belum ada ada belum disahkan (pengesahan kepala daerah, Bappeda, Sekda,lembar komitmen,dll) ada sudah disahkan (pengesahan kepala daerah, Bappeda, Sekda,lembar komitmen,dll)	0 1 2	
				Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir	belum ada ada belum disahkan (pengesahan kepala daerah, Bappeda, Sekda,lembar komitmen,dll) belum ada	0 1 2 0	
				Rencana Kontijensi Tanah Longsor	ada belum diuji secara rutin ada sudah diuji secara rutin berkala (pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini) belum ada ada belum disahkan (pengesahan kepala daerah, Bappeda, Sekda,lembar komitmen,dll) ada sudah disahkan (pengesahan kepala daerah, Bappeda, Sekda,lembar komitmen,dll) belum ada ada belum diuji secara rutin ada sudah diuji secara rutin berkala (pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini)	1 2 0 1 2 0 1 2	
				Rencana Kontijensi Erupsi Gunungapi Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunungapi Infrastruktur evakuasi bencana erupsi Gunungapi	belum ada (ruang evakuasi)	0	

			Rencana Kontijensi Kekeringan	ada belum memenuhi standar ada sudah memenuhi standar belum ada ada belum disahkan (pengesahan kepala daerah, Bappeda, Sekda,lambar komitmen,dll) ada sudah disahkan (pengesahan kepala daerah, Bappeda, Sekda,lambar komitmen,dll) belum ada ada belum diuji secara rutin ada sudah diuji secara rutin (pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur derindian dini) belum ada mekanisme dan prosedur penentuan status tanggap darurat ada mekanisme dan prosedur penentuan status tanggap darurat tetapi belum disahkan	1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1	
			Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan			
			Rencana Kontijensi Banjir Bandang Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Penentuan Status Tanggap Darurat	ada mekanisme dan prosedur penentuan status tanggap darurat dan sudah disahkan belum ada mekanisme dan prosedur Penerapan Sistem Komando operasi darurat ada mekanisme dan prosedur Penerapan Sistem Komando operasi darurat tetapi belum disahkan ada mekanisme dan prosedur Penerapan Sistem Komando operasi darurat dan sudah disahkan belum ada relawan dan personil terlatih serta prosedur melakukan kaji cepat pada masa krisis ada salah satu komponen (relawan dan personil terlatih atau prosedur) melakukan kaji cepat pada masa krisis tersedia semua komponen (relawan dan personil terlatih atau prosedur) melakukan kaji cepat pada masa krisis belum ada relawan dan personil terlatih serta prosedur melakukan Penyelamatan dan Pertolongan Korban Pertolongan Korban ada salah satu komponen (relawan dan personil terlatih atau prosedur) melakukan Penyelamatan dan Pertolongan Korban	2 0 1 1 2 0 1 0 1	
			Penerapan Sistem Komando operasi darurat			
			pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana			
			Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban			

			Perbaikan rumah penduduk	ada mekanisme / rencana Pemulihan Infrastruktur Penting dan sudah disahkan belum ada mekanisme / rencana Perbaikan rumah penduduk ada mekanisme / rencana Perbaikan rumah penduduk tetapi belum disahkan ada mekanisme / rencana Perbaikan rumah penduduk dan sudah disahkan belum ada mekanisme / rencana Pemulihan Penghidupan Masyarakat ada mekanisme / rencana Pemulihan Penghidupan Masyarakat tetapi belum disahkan ada mekanisme / rencana Pemulihan Penghidupan Masyarakat dan sudah disahkan	2 0 1 2 0 1 2
			Pemulihan Penghidupan Masyarakat		

Pt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19651203 198902 1 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Lamtoro No. 71 Tidar Baru Kota Magelang 56126 Telp. (0293) 319701

Website : bpbd.magelangkota.go.id Email : bpbdkotamagelang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR : 505 / 08.3 / 460

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2022-2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama ;
 - b. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang tepat perlu untuk merubah keputusan Plt Kepala Pelaksana Badan Pananggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Nomor 050 / 038.1/460 tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama 2022 -2026
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2022-2026
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - 2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 80) ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842) ;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini menjelaskan tentang rumusan pengukuran atas tolok ukur indikator kinerja utama.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal : 6 Januari 2024
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG



MACHBUB YANI ARFIAN

Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang

Nomor : 505 / 08-3 / 460

Tanggal : 08 Januari 2024

KINERJA UTAMA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/KETERANGAN
1	2	3	4
Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana Daerah	Bahaya dikali Kerentanan dibagi Kapasitas
	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	Jumlah Capaian Tujuh Parameter IKD

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG


MACHBUB YANI ARFIAN

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

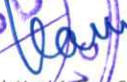
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	Penanggungjawab
					Target	Target	Target	Target	
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur									
1	Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	angka	98.25	0	0	0	98.25	Ka Pelaksana BPBD
2	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	angka	41	0	0	0	41	Ka Pelaksana BPBD

Mengetahui
Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang

Machbub Yani Arifian, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	Tri Wula I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	Penanggungjawab
					Target	Target	Target	Target	
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur									
1	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja	akupan terwujudnya Pelayanan Kantor, Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja	%	100	25	50	75	100	Sekretaris

Mengetahui,
Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang

Machbub Yani Arifiani, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001

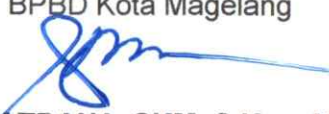
SEKRETARIS

PUTUT HANDOKO, S.STP
NIP. 19761015 199703 1 003

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana Target				Penanggungjawab
					Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur									
1	Tercapainya penyusunan kebijakan dan kelembagaan	Jumlah Kebijakan dan kelembagaan yang ditetapkan	Dokumen	2			2		Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Tercapainya Penyusunan Pengkajian Risiko/Renkon	Jumlah Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Dokumen	1				1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3	Tercapainya Sistem Informasi, Diklat/TRC dan Logistik yang dilaksanakan	Jumlah Sistem Informasi, Diklat dan Logistik yang dilaksanakan	Laporan	2	1	1			Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	Tercapainya SPM Kebencanaan	Persentase Tercapainya SPM Kebencanaan	Percentase	100%	0%	0%	25%	75%	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5	Tercapainya Kawasan Tematik Rawan Bencana yang ditetapkan	Jumlah Kawasan Tematik Rawan Bencana yang ditetapkan	Dokumen	2		1	1		Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6	Tercapainya Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan	Jumlah Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan	Kegiatan	3		2		1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
7	Tercapainya Perkuatan Kesiapsiagaan/Gladi dan Penanganan Darurat Bencana yang Dilaksanakan	Jumlah Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang Dilaksanakan	Laporan	2		1		1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan


 Mengetahui
 Kepala Pelaksana BPBD
 Kota Magelang
MACHBUB YANI ARFIAN, SPd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651203 198903 1 001

Kepala Bidang
 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 BPBD Kota Magelang

ADI SATDANA. SKM. S.Kep, Ners
 Pembina
 NIP. 19710617 199503 1 004

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	Penanggungjawab
					Target	Target	Target	Target	
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur									
1	Tercapainya Penyusunan Kebijakan Kelembagaan	Tersusunnya Kebijakan dan Kelembagaan	dokumen	2	1	1	-	-	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
2	Tercapainya Sistem Informasi, Diklat dan Logistik yang dilaksanakan	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Sistem Informasi , Diklat dan Logistik	dokumen	2	1	1	-	-	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3	Tercapainya SPM Kebencanaan	Terpenuhinya SPM Kebencanaan	%	100	25%	25%	25%	25%	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
4	Tercapainya Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang Dilaksanakan	Terlaksana Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	dokumen	2	1	1	-	-	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Mengetahui,
Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang


Machbub Yani Arfian, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001

KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK


Wahidin Sektianto ST, M.Si
NIP. 19740914 200501 1 010

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Rencana Target				Penanggungjawab
				Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tat Ruang dan Infrastruktur								
1	Tercapainya Penyusunan Kebijakan dan Kelembagaan	Jumlah Kebijakan dan Kelembagaan yang ditetapkan	1 Dokumen/ Draft Perwal	-	-	1	-	Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekontruksi
2	Tercapainya Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana yang dilaksanakan	Jumlah Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana yang dilaksanakan	12 Dokumen	3	3	3	3	Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekontruksi

Mengetahui
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Magelang


MACHBUB YANI ARFIANSPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690410 199503 1 006

Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekontruksi
BPBD Kota Magelang



SIGIT BUDIANTORO, SR

Pembina
NIP. 19690410 199503 1 006

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana Target				Penanggungjawab
					Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur									
1	Tercapainya pelayanan informasi rawan bencana	Presentase WN yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	%	100	25	50	75	100	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
2	Sosialisasi komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan Bencana kab/kota	Jumlah warga negara yang mrmperoleh layman informaSi rawam becana	orang	300	60 orang	60 orang	120 Orang	60 orang	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
3	Tercapainnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Presentase WN yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	25	50	75	100	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
4	Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kanupaten/kota	Jumlah pelatihan pencegahan dan mitiasi bencana kab/kot0	kawanan	3	1	1	1	3	Analisis Kebencanaan Ahli Muda

Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kota Magelang


ADI SATDANA. SKM. S.Kep, Ners
Pembina
NIP. 19710617 199503 1 004

Analisis Kebencanaan Ahli Muda
BPBD Kota Magelang


SUYONO, SE
Penata
NIP. 19700822 200604 1 002

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana Target				Penanggungjawab
					Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur									
1	Tercapainya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase WN yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	25	50	75	100	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
2	Melaksanakan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawasan	2		1 kegiatan	1 kegiatan		Analisis Kebencanaan Ahli Muda
3	Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	orang	30		30 orang		30 orang	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
4	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	orang	175		75 orang		100 orang	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
5	Penyusunan Rencana Kontingensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontingensi yang Dilegalisasi	dokumen	1		1 dokumen			Analisis Kebencanaan Ahli Muda

Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kota Magelang


ADI SATDANA. SKM. S.Kep. Ners
Pembina
NIP. 19710617 199503 1 004

Analisis Kebencanaan Ahli Muda
BPBD Kota Magelang


MUHAMMAD SURYONO, SH
Penata Tk. I
NIP. 19670225 198903 1 006

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Rencana Target				Penanggungjawab
				Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur								
1	Tersedianya Peralatan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri, bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	20 Jenis	8 jenis	9 Jenis	3Jenis	0 Jenis	JF Penanggulangan Bencana Ahli Muda
2	Tersedianya Dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kota	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	JF Penanggulangan Bencana Ahli Muda
	Terdistribusinya Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Koraban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	20 orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 orang	JF Penanggulangan Bencana Ahli Muda

Mengetahui,
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kota Magelang


Herwanto Tri. S, SH.MM.Pd
Pembina
NIP. 196602101988031017

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
BPBD Kota Magelang


Suryani Dwi Daryani, S.Sos
Penata TK I
NIP. 19670910 199603 2 002

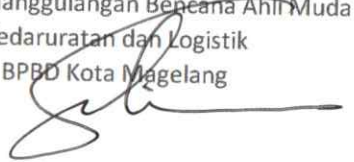
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Rencana Target				Penanggungjawab
				Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur								
	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa / Wabah Prioritas	4 laporan	1	1	1	1	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	Terlaksananya Upaya untuk menemukan, menolong maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang lebih aman.	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	1 orang				1	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	Terlaksananya pengerahan dan pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi	Jumlah laporan aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 laporan				1	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 x 24 jam	Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen				1	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Mengetahui,
Kepala Bidang
Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kota Magelang


Herwanto Tri Sungkowo, S.H., M.M.Pd.
Pembina IV/ A
NIP. 19660210 198803 1 017

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kota Magelang


Siska Sriyoga, S.Sos
Penata Muda Tk. 1 / III B
NIP. 19781201 201001 1 011

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Rencana Target				Penanggungjawab
				Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tat Ruang dan Infrastruktur								
1	Meningkatkan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase pemulihan infrastruktur penting dan prosentase pemulihan Sosial dan Spikis Korban	100%					Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekontruksi
2	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen/ Draft Perwal			1		Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekontruksi
3	Tersedianya Dokmen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca	Jumlah Dokumen Penanganan pasca bencanakabupaten/kota melalui Pengakajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rehabilitasi & Rekontruksi Pasca Bencana (R3P)	12 Dokumen	3	3	3	3	Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekontruksi

Mengetahui,
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi
BPBD Kota Magelang


SIGIT BUDIANTORO,SE
Pembina
NIP. 19690410 199503 1 006

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
BPBD Kota Magelang


Ana Parimeta, SH
Penata Tk I
NIP. 19760505 200101 2 003

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	Penanggung jawab
					Target	Target	Target	Target	
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur									
1	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	18	5	3	5	5	Ka Sub Bag Program dan Keuangan
2	Terpenuhinya pelayanan administrsi keuangan	Cakupan terpenuhinya pelayanan administrsi keuangan	dokumen	12	3	3	3	3	Ka Sub Bag Program dan Keuangan

Mengetahui,
SEKRETARIS

PUTUT HANDOKO, S.STP
NIP. 19761015 199703 1 003

KA SUB BAG PROGRAM DAN KEUANGAN

FATAH ISTI MARYATUN, SE
NIP. 19750122 19403 2 003

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Rencana Target				Penanggungjawab
				Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur								
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah.	Cakupan terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah.	100%	25%	25%	25%	25%	Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2	Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Cakupan terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	100%	25%	25%	25%	25%	Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Cakupan terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100%	25%	25%	25%	25%	Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 Mengetahui,
Sekretaris
BPBD Kota Magelang

Putut Handoko, S.STP
Pembina

NIP. 19761015 199703 1 003

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian
BPBD Kota Magelang


Agustinus Setyo Riyadi, SIP
Penata Tingkat I

NIP. 19750430 200212 1 006

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Yang Telah Dilakukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggungjawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur																						
1	Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	angka	98.25	0	0	0	0	0	0	98.25	93.35	95.01%	98.25	93.35	95.01%	1. Dibentuknya Perda No 3 Tahun 2026 ttg Bentuk Susunan Perangkat Daerah 2. Dibentuknya Tim Reaksi Cepat Lintas Sektoral 3. Adanya Relawan	1. Kurangnya dukungan anggaran 2. Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana	1. Meningkatkan kerjasama unsur pentahelix 2. Mengajukan proposal bantuan kepada instansi vertikal	1. Perlu dukungan anggaran yang cukup 2. Peningkatan Kapasitas SDM dan sarana prasarana	Meningkatkan koordinasi unsur pentha helix	Ka Pelaksana BPBD
2	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	angka	41	0	0	0	0	0	0	41	48	117.07%	41	48	117.07%	1. Dibentuknya Perda No 3 Tahun 2026 ttg Benteukan Susunan Perangkat Daerah 2. Dibentuknya Tim Reaksi Cepat Lintas Sektoral 3. Adanya Relawan	1. Kurangnya dukungan anggaran 2. Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana	1. Meningkatkan kerjasama unsur pentahelix 2. Mengajukan proposal bantuan kepada instansi vertikal	1. Perlu dukungan anggaran yang cukup 2. Peningkatan Kapasitas SDM dan sarana prasarana	Meningkatkan koordinasi unsur pentha helix	Ka Pelaksana BPBD

Mengetahui,
Kepala Pelaksana BPBD Kota

Machbub Yanti Arifian, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Yang Telah Dilakukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggungjawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur																						
1	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja	Cakupan terwujudnya Pelayanan Kantor, Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja	%	100	25	25	100%	50	50	100%	75	75	100%	100	100	100%	-	-	-	-	-	Sekretaris

Mengetahui,
Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang

Machub Yani Arfian, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



SEKRETARIS



PUTUT HANDOKO, S.STP
NIP. 19761115 199703 1 003

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur																						
1	Tercapainya penyusunan kebijakan dan kelembagaan	Jumlah Kebijakan dan kelembagaan yang ditetapkan	Dokumen	2							2	2	100%				Telah disusun dokumen Renkon (Longsor dan Angin)	Belum dilegalisasi dokumen Rekon (Longsor dan Angin)	Telah berkoordinasi dg bagian Hukum Pemerintah Kota Magelang	Melaksanakan Legalisasi	Melengkapi laporan pada format penjelasan	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Tercapainya Penyusunan Pengkajian Risiko/Renkon	Jumlah Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Dokumen	1										1	1	100%	Telah disusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	Belum dilegalisasi dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	Mengajukan SK Tim penyusun Renkon	Legalisasi dokumen dengan Perauran Walikota	Mengajukan Raperwal Renkon melalui sistem	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3	Tercapainya Sistem Informasi, Diklat dan Logistik yang dilaksanakan	Jumlah Sistem Informasi, Diklat dan Logistik yang dilaksanakan	Laporan	2	1	1	100%	1	1	100%							Kemajuan teknologi informasi, dan aplikasi pemantauan dan pendidikan yang diakses melalui sistem	Belum semua teknologi informasi, dan aplikasi diakses oleh masyarakat	Melaksanakan kegiatan KIE sesuai tema dan media	Membuat Kegiatan dan informasi melalui media	Membuat jadwal kegiatan	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	Tercapainya SPM Kebencanaan	Persentase Tercapainya SPM Kebencanaan	Percentase	100%			0%		0	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Adanya kebijakan prioritas kegiatan dari pemerintah kota untuk mendukung pencapaian SPM	Belum semua dokumen pendukung selesai dalam waktu/periode yang sama	Telah dilaksanakan kegiatan program yang mendukung SPM	Melengkapi dokumen data dukung	Menyiapkan dan membuat dokumen data dukung SPM Bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5	Tercapainya Kawasan Tematik Rawan Bencana yang ditetapkan	Jumlah Kawasan Tematik Rawan Bencana yang ditetapkan	Kawasan	2				1	1	100%	1	1	100%				Meningkatkan pengetahuan kebencanaan pada masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan	Melaksanakan kegiatan pelatihan	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal	Membuat jadwal kegiatan secara terus menerus	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

6	Tercapainya Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan	Jumlah Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan	Kegiatan	3				2	2	100%				0%	1	1	100%	Kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat mengenai bahaya bencana dan pentingnya pencegahan serta mitigasi	belum memahami pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko	Melaksanakan kegiatan pelatihan	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal	Membuat jadwal kegiatan secara terus menerus	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
7	Tercapainya Perkuatan Kesiapsiagaan/ Gladi dan Penanganan Darurat Bencana yang Dilaksanakan	Jumlah Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang Dilaksanakan	Laporan	2				1	1	100%				100%	1	1	100%	Meningkatkan pengetahuan kebencanaan pada masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan	Melaksanakan kegiatan pelatihan	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal	Membuat jadwal kegiatan secara terus menerus	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Mengetahui
Kepala Pelaksana BPBD
Kota Magelang



MACHBUB YANI ARFIAN,SPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19651203 198903 1 001

Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kota Magelang



ADI SATDANA. SKM. S.Kep, Ners
Pembina
NIP. 19710617 199503 1 004

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Penanggungjawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur																	
1	Tercapainya Penyusunan Kebijakan Kelembagaan	Tersusunnya Kebijakan dan Kelembagaan	dokumen	2	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
2	Tercapainya Sistem Informasi, Diklat dan Logistik yang dilaksanakan	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Sistem Informasi , Diklat dan Logistik	dokumen	2	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3	Tercapainya SPM Kebencanaan	Terpenuhinya SPM Kebencanaan	%	100	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
4	Tercapainya Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang Dilaksanakan	Terlaksananya Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	dokumen	2	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Mengetahui,
Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang


Machbub Yani Arfian, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK


Wahidin Sektianto, ST, M.Si
NIP. 19740914 200501 1 010

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target Tahunan	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			faktor Pendorong	Faktor Penghamb	Upaya Perbaikan	Rekomen dasi	Tindaklanj ut	Penanggu ngjawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19			20
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tat Ruang dan Infrastruktur																						
1	Tercapain ya Penyusun an Kebijakan dan Kelembag aan	Jumlah Kebijakan dan Kelembagaa n yang ditetapkan	%	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Kepala Bidang Rehabilita si dan Rekontruk si
2	Tercapain ya Pegemban gan Sistem Pemulihan Bencana yang dilaksanak an	Jumlah Pengembang an Sisten Pemulihan Bencana yang dilaksanakan	%	12	3	5	41.6%	3	3	25%	3	3	25%	3	5	41.6%	Penanganan Pascabencan a yang terkoordinas i, Cepat dan tepat	Belum adanya Regulasi pemberia n Bantuan Korban dampak bencana, mengakib atkan penangan an pasca bencana sangat tergantun g kepada bantuan dan organisasi kemasyar akatan	Perlu adanya Regulasi yang mengatur tentang Penyeleng garaan Penanggul an Bencana dan Pemberia n Bantuan (PERDA & PERWAL)	Menyusun Regulasi terkait , Penangan an Penanggul an Bencana PERDA dan PERWAL	sudah tersusun PERDA Penyeleng garaan Penanggul an Bencana	Kepala Bidang Rehabilita si dan Rekontruk si

Mengetahui,
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Magelang



Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi
Kota Magelang


SIGIT BUDIANTORO, SE
Pembina

NIP. 19690410 199503 1 006

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur																						
1	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	0%	0%	0%	1	1	100%	1	1	100%	0	0	0%	Meningkatkan pengetahuan Kebencanaan kepada masyarakat	Kurangnya Pelatihan masyarakat tentang kebencanaan	Melaksanakan kegiatan pelatihan	Kegiatan dilaksanakan sesuai program	Melaksanakan kegiatan secara terus menerus	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	orang	30	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	Meningkatkan pengetahuan Kebencanaan kepada masyarakat	Kurangnya Pelatihan masyarakat tentang kebencanaan	Melaksanakan kegiatan pelatihan	Kegiatan dilaksanakan sesuai program	Melaksanakan kegiatan secara terus menerus	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	orang	175	0	0	0%	75	75	100%	0	0	0%	100	100	100%	Meningkatkan pengetahuan Kebencanaan kepada masyarakat	Kurangnya Pelatihan masyarakat tentang kebencanaan	Melaksanakan kegiatan pelatihan	Kegiatan dilaksanakan sesuai program	Melaksanakan kegiatan secara terus menerus	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	Penyusunan Rencana Kontingensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontingensi yang Dilegalisasi	dokumen	1	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	Tersedianya dokumen informasi Kebencanaan secara rinci	Belum terlaksanannya simulasi	Sosialisasi Renkon kepada OPD terkait	Dilaksanakannya simulasi renkon	Melaksanakan simulasi secara berlanjut	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Megetahui
Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kota Magelang


ADI SATDANA. SKM. S.Kep, Ners
Pembina
NIP. 19710617 199503 1 004

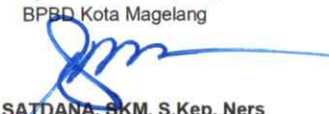
Analisis Kebencanaan Ahli Muda
BPBD Kota Magelang


MUHAMMAD SURYONO, SH
Penata TK. I
NIP. 19670225 198903 1 006

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur																					
1	Sosialisasi komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan Bencana kab/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layman informasi rawan bencana	2	1	1	100%	1	1	100%							Kemajuan teknologi informasi dan aplikasi pemantauan dan pendidikan yang di akses melalui sistem	Belum semua teknologi informasi dan aplikasi di akses oleh masyarakat	melaksanakan kegiatan KIE sesuai tema dan media	Membuat kegiatan dan informasi melalui media	Membuat jadwal kegiatan	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Jumlah pelatihan pencegahan dan mitiasi bencana kab/kota	3				2	2	100%				1	1	100%	Kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat mengenai bahaya bencana dan pentingnya pencegahan serta mitigasi	Belum memahami pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana, serta cara cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko	Melaksanakan kegiatan Pelatihan	kegiatan dilaksan akan sesuai jadwal	Membuat jadwal kegiatan secara terus menerus	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kota Magelang



ADI SATDANA, SKM. S.Kep. Ners
Pembina
NIP. 19710617 199503 1 004

Apalis Kebencanaan
BPBD Kota Magelang



SUYONO, SE
Penata
NIP. 19700822 200604 1 002

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target Tahunan	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			faktor Pendorong	Faktor Penghamb	Upaya Perbaikan	Rekomen dasi	Tindakanj ut	Penanggu ngjawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19			20
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tat Ruang dan Infrastruktur																						
1	Meningka tkan Penataan Sistem Dasar Penangula ngan Bencana	Prosentase Pemulihan insfrastrukt r penting dan prosentase pemulihan Sosial dan Spikis Korban	100%	100%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Kepala Bidang Rehabilita si dan Rekontruk si

2	Tersedian ya Dokumen Penangan an Pascabenc ana Kabupate n/Kota Melalui Pengkajia n Kebutuha n PascaBenc na (JITUPASNA) Rehabilitasi si dan Rekontruk si PascaBenc ana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) & Rekontruksi Pasca Bencana (R3P)	%	12 Dokumen	3	5	41.6%	3	3	0.25%	3	3	25%	3	5	41.6%	Penanganan Pascabencana yang terkoordinasi, Cepat dan tepat	Belum adanya Regulasi pemberia n Bantuan Korban dampak bencana, mengakib atkan penangan an pasca bencana sangat tergantun g kepada bantuan dan organisasi kemasyar akatan	Perlu adanya Regulasi yang mengatur tentang Penyeleng garaan Penanggul angan Bencana dan Pemberia n Bantuan (PERDA & PERWAL)	Menyusun Regulasi terkait Penangan an Penanggul angan Bencana PERDA dan PERWAL	Sudah tersusun PERDA Penyeleng garaan Penanggul angan Bencana	Kepala Bidang Rehabilita si dan Rekontruk si
3	Penyusun an Regulasi Penangula ngan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelengga raan Penanggulan gan Bencana	%	1 Dokumen/D raft	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Koordinasi yang baik bersama dengan OPD dan Stakeholder untuk pelayanan Penanganan Bencana secara Cepat dan Tepat	belum tersusuns an Peraturan Terkait Bantuan Bencana	Upaya Penyusua nan Peraturan Walikota terkait Bantuan Kebencan aan	Menyusun Peraturan Walikota terkait Bantuan Kebencan aan	Draft Raperwal	Kepala Bidang Rehabilita si dan Rekontruk si

Mengetahui,
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi
Kota Magelang



SISGIT BUDIANTORO,SE

Pembina

NIP. 19690410 199503 1 006

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

BPBD Kota Magelang



ANA PARIMETA,SH

Penata Tk I

NIP. 19760505 201001 2002

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Yang Telah Dilakuka	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggungjawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur																						
1	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perabgkat daerah	Cakupan terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	18	5	5	100%	3	3	100%	5	5	100%	5	5	100%	-	-	-	-	-	Ka Sub Bag Program dan Keuangan
2	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Cakupan terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	dokumen	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	-	-	-	-	-	Ka Sub Bag Program dan Keuangan

Mengetahui,
SEKRETARIS

PUTUT HANDOKO, S.STP
NIP. 19761015 199703 1 003

KA SUB BAG PROGRAM DAN KEUANGAN

FATAH ISTI MARYATUN, SE
NIP. 19750122 19403 2 003

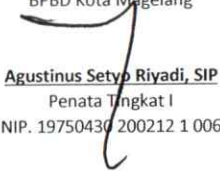
MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang telah dilakukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggungjawab
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tat Ruang dan Infrastruktur																					
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah.	Cakupan terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah.	100%	25	25	100	25	25	100	25	25	100	25	25	100	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Cakupan terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	100%	25	25	100	25	25	100	25	25	100	25	25	100	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Cakupan terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100%	25	25	100	25	25	100	25	25	100	25	25	100	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Mengetahui,
Sekretaris BPBD
Kota Magelang


Putut Handoko, S.STP
Pembina
NIP. 19761015 199703 1 003

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BPBD Kota Magelang


Agustinus Setyo Riyadi, SIP
Penata Tingkat I
NIP. 19750430 200212 1 006



WALI KOTA MAGELANG

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 4000.3.13.3/550/122

WALI KOTA MAGELANG dengan ini memberikan penghargaan kepada :

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

Sebagai Peringkat III (tiga) Organisasi Perangkat Daerah dengan Kinerja terbaik Triwulan II Tahun 2024

Magelang, 31 Juli 2024

WALI KOTA MAGELANG



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD., Subsp.GH., Finasim